



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jl. Sutan Syahrir No. 2B Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya acuan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkalan Bun, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kotawaringin Barat



J. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja	Ket
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	6,7 T	3.730.442.195.540	55,68 %	Rendah	Berdasarkan target Renstra
Capaian sasaran strategis 1					55,68 %		
2	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	3,09 T	3.730.442.195.540	120,71 %	Sangat Tinggi	Berdasarkan Target Sebaran Nasional untuk Kabupaten Kotawaringin Barat
Capaian sasaran strategis 1					120,71 %		
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84	95,28	113,96%	Sangat Tinggi	Berdasarkan target Renstra
Capaian sasaran strategis 2					113,96 %		

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023 berdasarkan **target Renstra** sebesar 84,82 % dengan peringkat kinerja tinggi. Sedangkan berdasarkan **Target Sebaran Nasional untuk Kabupaten Kotawaringin Barat** sebesar 117,34 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- a. Bertambahnya jumlah penugasan mandatory yang setiap tahun sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
- b. Beberapa sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memenuhi contohnya Mal Pelayanan Publik (MPP);
- c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikutsertakan ASN dalam kegiatan Bimtek/ Diklat pelayanan publik;
- d. Kurangnya SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara disiplin ilmu berkesesuaian dengan jenis perizinan yang ditangani.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Diagram.....	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Data Umum	2
1.3. Aspek Strategis.....	9
1.4. Permasalahan Utama	11
1.5. Landasan Hukum.....	14
1.6. Sistematika Penyajian	15
BAB II Perencanaan Kinerja.....	17
2.1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17
2.2. Indikator Kinerja Utama	20
2.3. Rencana Kinerja Tahunan	21
2.4. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	28
3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional	41
3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.5. Inovasi dan penghargaan yang Diraih	44
3.6. Realisasi Keuangan.....	48
BAB IV Penutup	52
Lampiran – Lampiran	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
Tabel 1.2. Data Pegawai Per 31 Desember 2023	6
Tabel 1.3. Analisis Kebutuhan Pegawai 2023.....	7
Tabel 1.4. Data Aset Tahun 2023	8
Tabel 1.5. Matrix Analisis SWOT.....	13
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran DPMPSTSP Tahun 2023-2026	19
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
Tabel 2.3. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.....	21
Tabel 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel 2.5. Anggaran Program Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel: 2.6 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Tahun 2023.....	24
Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Daerah	28
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023.....	31
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	31
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra...	32
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023.....	37
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	38
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan	

Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra	38
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.....	42
Tabel 3.10 Perbandingan realisasi dengan capaian Kabupaten sekitar	42
Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran 2023	43
Tabel 3.12 Kegiatan Lintas Sektoral	44
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2023	48
Tabel 3.14 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).....	26
Gambar 2.2. Sicantik AplikasiCerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	27
Gambar 2.3. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	27
Gambar 3.1. Layanan Hallo PTSP	45
Gambar 3.2. LaPer BOSS (Layanan Perizinan Berbasis OSS)	46
Gambar 3.3. Peta Potensi Investasi Melalui Web DPMPTSP	47
Gambar 3.4. Gambar penghargaan dari Ombudsman	47

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1. Diagram Jumlah Izin Terbit.....	35
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya pada tahun 2022 terbit Perbup Terbaru yaitu Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- b. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- c. pengidentifikasian sumber- sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- d. pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan menjadi kewenangan daerah;

- f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- g. pengolahan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 1) Subbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan 3. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1. Dibawah Subbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Barang Milik Negara 3) Pengelola Kepegawaian 2. Dibawah Subbag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program 1) Bendahara Pengeluaran 2) Verifikator keuangan 3) Pengelola Keuangan 4) Pengolah Data 5) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Dibawah bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal 1)Analis Pengembangan Potensi Daerah 2)Pengelola Data 3)Analis Penanaman Modal 4)Penyusun Bahan Kebijakan 5)Pengolah Data Kebijakan Investasi 6)Pengadministrasi Umum 7)Penyusun Bahan Kebijakan	1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (1 Orang) 2. Perencana 3. Penata Perizinan (3 Orang) 4. Penata Kelola Penanaman Modal (7 Orang) 5. Arsiparis (1 Orang)

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
<p>4. BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</p>	<p>8) Analis Investasi Daerah</p> <p>4. Dibawah bidang promosi, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perancang Promosi 2) Pranata Promosi 3) Fasilitator Promosi 4) Perancang Desain Pameran 5) Analis Desain Pameran 6) Penata Pameran 7) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 8) Pengolah Informasi Media 9) Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi 	
<p>5. BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	<p>5. Di bawah bidang pelayanan terpadu satu pintu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Pengaduan Publik 2) Penyusun Bahan Kebijakan 3) Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 4) Analis Dokumen Perizinan 5) Pengelola Perizinan 6) Pengadministrasi Perizinan 7) Pengadministrasi Umum 8) Pengadministrasi Umum 	
<p>6. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p>	<p>6. Di bawah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan 2) Penyusun Bahan Kebijakan 3) Pengelola Data Temuan Pengawasan 4) Analis Pengawasan 5) Pengelola Data 6) Analis Data dan Informasi 	

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022.

Perubahan nomenklatur tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 16 Februari 2023 melalui pengukuhan dan pengambilan sumpah dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2/642/SJ/ tanggal 2 Februari 2023 dan Pertimbangan Teknis Pengukuhan, Mutasi dan Promosi Pejabat Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1375/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 31 Januari 2023. Perubahan nomenklatur Sekretariat Daerah merupakan salah satu bentuk penyederhanaan birokrasi. Dimana penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekedar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 39 orang Pegawai yang terdiri dari 17 orang laki-laki (43,59 %), dan 22 orang perempuan (45,41 %). Berdasarkan

kualifikasi Pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh pegawai dengan Pendidikan S2 sejumlah 4 orang (10,26 %), S1/DIV sejumlah 17 orang (43,59 %), D3 sejumlah 7 orang (17,95 %), SMA sejumlah 10 orang (25,64 %) dan SD sejumlah 1 orang (2,56 %). Gambar rincian data pegawai sebagaimana berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2023

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	JenisKelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SD	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1		1					1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator	4		4	3	1				4	
	2. Pengawas	1		1			1			1	
	3. Pelaksana	22	11	11		6	6	9	1	13	9
C	Jabatan Fungsional	11	5	6		10		1		11	
	Jumlah	39	17	22	4	17	7	10	1	30	9

Sumber: Data Pegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Per 31 Desember 2023

Kebutuhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2023

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat	Bendahara Pengeluaran	1	1	0
	Verifikator Keuangan	1	1	0
	Pengelola Keuangan	0	0	1
	Pengelola data perencanaan penganggaran	1	1	0
	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
	Pengadministrasian Umum	1	1	0
	Pengelola Barang milik Negara	1	1	0
	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	1	0	1
	Pengelola Data	3	0	3
	Analisis Penanaman Modal	1	1	0
	Penyusun Bahan Kebijakan	1	0	1
	Pengolah Data Kebijakan Investasi	1	0	1
	Pengadministrasian Umum	1	0	1
	Penyusun Bahan Kebijakan	1	0	1
	Analisis Investasi Daerah	1	0	1
Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Perancang Promosi	2	1	1
	Pranata Promosi	1	0	1
	Fasilitator Promosi	1	0	1
	Perancang Desain Pameran	1	0	1
	Analisis Desain Pameran	1	0	1
	Penata Pameran	1	0	1
	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	0	1
	Pengolah Informasi Media	1	0	1
	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	1	0	1
Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelola Pengaduan Publik	2	1	1
	Penyusun Bahan Kebijakan	1	0	1
	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	2	1	1
	Analisis Dokumen Perizinan	2	1	1
	Pengelola Perizinan	8	4	4
	Pengadministrasian Perizinan	5	2	3
	Pengadministrasian Umum	3	1	2
Kepala Bidang Pengawasan	Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan	3	1	2

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
dan Pengendalian	Penyusun Bahan Kebijakan	1	0	1
	Pengelola Data Temuan Pengawasan	2	0	2
	Analisis Pengawasan	1	0	1
	Pengelola Data	2	1	1
	Pengolah Data	1	0	1
	Analisis Data dan Informasi	1	0	1
Jabatan Fungsional	<i>JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda</i>	1	1	0
	<i>JF Arsiparis Pertama</i>	1	1	0
	<i>JF Penata Perizinan Ahli Muda</i>	3	3	0
	<i>JF Penata Kelola Penanaman Modal</i>	9	6	3
TOTAL		75	31	45

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2023, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2023

No	Klasifikasi	Nama BidangBarang	JumlahBarang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	1	0 Sertifikat gabung dengan Dinas Pariwisata
2	Peralatan&Mesin	Alat-alat Besar	0	0
		Alat-alat Angkut	7	447.841.100,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	9.300.000,00
		Alat Kantor dan RumahTangga	389	4.344.309.169,00
		Alat Studio Komunikasi	13	57.600.000,00
		Alat Kedokteran	1	1.815.000,00
		Alat Persenjataan	0	24.800.000
		Alat Komputer		Rekap sudah gabung di Alat Kantor dan RT
		DII (diisi sesuai dengan Jenis di KIB)		
3	Gedung&Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	1	3.435.778.046,00

No	Klasifikasi	Nama BidangBarang	JumlahBarang	Nilai (Rp)
		Gedung Rumah Dinas		
		DII (diisi sesuai dengan Jenis di KIB)		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	0	0
		Jembatan	0	0
		Instalasi Listrik dan Telp	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	98 BUKU	14.000.000,00
		Barang Bercorak Kesenian	0	0
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	6	342.013.242,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0	0

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2023

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/lokal provinsi. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian

- Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Standar Operasiona Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh personil ASN DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 4. Kapasitas SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meningkat;
 5. Adanya Anggaran DAK Non Fisik fasilitasi Penanaman Modal pengawasan dan pengendalian PMA dan PMDN;
 6. Jumlah ASN yang masih kurang baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
 7. Belum terlaksananya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan mobil layanan perizinan
 8. Semakin meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat atas pengurusan perizinan dan nonperizinan;
 9. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat;
 10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam penyelenggaraan pelayanannya telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan yang mengandalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

1.4 Permasalahan Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:

- a) Percepatan proses pelayanan perizinan sesuai dengan SOP Pelayanan yang telah ditetapkan;
- b) Percepatan program mandatory dari pusat terkait pelaksanaan pembangunan MPP;
- c) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan di kecamatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d) Lemahnya pelaksanaan komunikasi, sinkronisasi dan integrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan SKPD terkait.

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strength*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi :

1. Tersedianya data potensi dan peluang investasi;
2. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Perizinan dan Penanaman Modal;
3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas;

4. Tersedianya Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan Perizinan;
5. Tersedianya anggaran unit kerja;
6. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan (*Weakness*) dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

1. Jumlah sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan;
3. Sistem pelayanan perizinan yang ada belum berjalan secara optimal;
4. Belum optimalnya pelayanan pengaduan;
5. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang (*opportunities*) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

1. Adanya Peraturan Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan;
2. Tersedianya Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah ketentuan pelayanan perizinan dan investasi;
4. Potensi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat masih besar.

<p>(SOPD) Jelas; 10. Tersedianya Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan Perizinan; 11. Tersedianya anggaran unit kerja; 12. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan</p>	<p>2. Meningkatkan kompetensi daripada tugas pokok dan fungsi aparatur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Mendayagunakan SDM, sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung iklim investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.</p>	<p>pelayanan perizinan pada DPMPSP Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Mendayagunakan potensi dan peluang investasi Kabupaten Kotawaringin Barat melalui event promosi; 3. Mendayagunakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki aparatur pelayanan dalam menghadapi persaingan global.</p>
<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal; 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan; 3. Sistem pelayanan perizinan yang ada belum berjalan secara optimal; 4. Belum optimalnya pelayanan pengaduan; 5. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal. 	<p>Alternatif Weakness (WO) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung perkembangan Usaha Perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta melalui promosi potensi unggulan daerah; 2. Mendorong investasi dengan meningkatkan sarana dan prasarana . 	<p>Alternatif Weakness (WT) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan dukungan anggaran untuk mendapatkan pembinaan dari pusat dalam meningkatkan pelayanan; 2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat/ pelaku usaha.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal tersebut pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematis Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2023-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematis penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis

1.4 Permasalahan Utama

1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Realisasi Anggaran

a. Inovasi

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPD 2023-2026 yang *tercascade* pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama empat tahun. Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama masa RPD. Visi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

**“KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA,
MANDIRI, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”**

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan dalam kegiatan dan program Pembangunan Daerah.

Adapun Misi Pembangunan Daerah Periode 2006 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman;
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis;
4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
5. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
6. Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait

dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang Berbasis Potensi dan Keunggulan;

7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan;
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan;
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketanagkerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Kewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan; dan
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang **kelima** yaitu:

“Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan”

Dan misi yang keenam yaitu :

“Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang Berbasis Potensi dan Keunggulan”

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026. Tabel Terlampir.

Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
					2023	2024	2025	2026
1	Mengoptimalkan realisasi penanaman modal	Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	6,7 T	6,8 T	6,9 T	7 T
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84	85	86	87

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA	Bidang Promosi PM, Bidang Perencanaan PM, Bidang Wasdal PM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan LKPM
Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bidang PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sumber: SK Kepala Dinas DPMPPTSP No. 973/44/SK/DMPTSP.A Tahun 2023

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.3 Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	6,7 T
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84

Sumber: Data Diolah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 telah menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	6,7 T
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.5 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Meningkatkan nilai investasi PMA dan PMDN			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	156.834.204	156.834.012	(192)
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif	116.834.204	129.334.012	12.499.808

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	116.834.204	129.334.012	12.499.808
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	40.000.000	27.500.000	(12.500.000)
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	40.000.000	27.500.000	(12.500.000)
Program Promosi Penanaman Modal	235.199.750	229.931.321	(5.268.429)
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	235.199.750	229.931.321	(5.268.429)
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	235.199.750	229.931.321	(5.268.429)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	450.500.000	450.500.000	0
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	450.500.000	450.500.000	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	119.309.000	0	(119.309.000)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	253.646.000	372.955.000	119.309.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	77.545.000	77.545.000	0
Sasaran: Meningkatnya pelayanan perizinan			
Program Pelayanan Penanaman Modal	132.147.100	130.481.300	(1.665.800)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	132.147.100	130.481.300	(1.665.800)
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	49.886.600	52.620.800	2.734.200
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	73.871.000	69.471.000	(4.400.000)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.389.500	8.389.500	0

Sumber: DPPA Tahun 2023

Tabel: 2.6 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang
Tahun 2023

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.409.800	93.775.608	(23.634.192)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.632.000	44.322.608	(26.309.392)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.497.250	2.497.250	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.505.500	2.505.500	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.497.250	2.497.250	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.752.500	1.752.500	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	35.023.700	37.698.900	2.675.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.501.600	2.501.600	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.529.815.413	4.622.566.429	92.751.016
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.469.362.163	4.571.628.195	102.266.032
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	5.500.000	8.865.000	3.365.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53.455.000	40.574.984	(12.880.016)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.498.250	1.498.250	0
Sasaran: Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi			

	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.316.000	67.836.000	(5.480.000)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.800.000	19.800.000	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.516.000	48.036.000	(5.480.000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.219.127	322.005.019	90.785.892
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.929.596	7.929.596	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.927.193	58.188.421	261.228
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.129.766	7.167.406	37.640
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.784.426	48.784.426	(23.734.426)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.448.146	223.669.596	114.221.450
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.505.677	94.505.677	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.505.677	94.505.677	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.156.378	268.686.883	(38.469.495)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	350.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.860.378	92.578.883	(41.281.495)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.946.000	175.758.000	2.812.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.812.000	78.482.751	(40.000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.072.751	44.072.751	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.450.000	34.410.000	(40.000)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198.875.000	198.875.000	0

Sumber: DPPA Tahun 2023

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

1. OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)
OSS Indonesia merupakan aplikasi untuk membantu pelaku usaha memproses perizinan berusaha dalam genggaman yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM.

Gambar 2.1

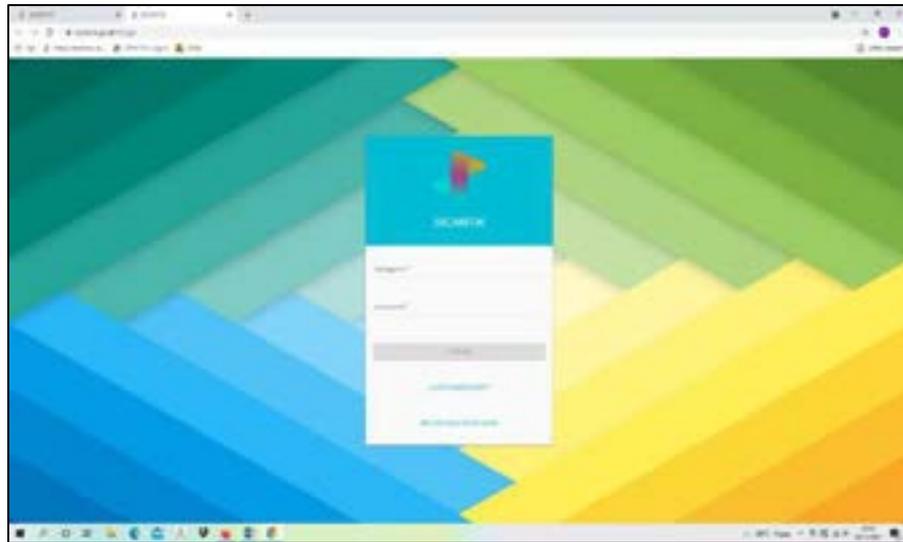
Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)



Sumber: <https://oss.go.id>

2. SiCantik
SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara GRATIS. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Gambar 2.2 SiCANTIK Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik



3. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)

SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Gambar 2.3 SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2023 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan

Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja	Ket
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	6,7 T	3.730.442.195.540	55,68 %	Rendah	Berdasarkan target Renstra
Capaian sasaran strategis 1					55,68 %		
2	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	3,09 T	3.730.442.195.540	120,71 %	Sangat Tinggi	Berdasarkan Target Sebaran Nasional untuk Kabupaten Kotawaringin Barat
Capaian sasaran strategis 1					120,71 %		
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	84	95,28	113,96%	Sangat Tinggi	Berdasarkan target Renstra
Capaian sasaran strategis 2					113,96 %		

Sumber: Data diolah

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

1

Sasaran: Meningkatkan nilai investasi PMA dan PMDN target kinerja sebesar 6.700.000.000.000 Triliun dan realisasi kinerja sebesar 3.730.442.195.540 Triliun dengan capaian kinerja sebesar 55,68 % atau rendah.

Sedangkan Target nasional untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.3.091.410.420.000,-Triliun sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 120,71 %.

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah nomor 570/136/B.IV/DPMPSTP-2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Rapat perkembangan Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal di Direktorat Wilayah II dengan peserta dari DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Jambi Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di Bandung, Jawa Barat, bahwa target realisasi investasi/BKPM RI yang diturunkan untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 16,09 Triliun. Berdasarkan surat tersebut mencantumkan realisasi investasi untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 3,09 Triliun.

Berdasarkan target Renstra, capaian kinerja realisasi investasi sebesar 55,68 % dengan kategori rendah namun jika berdasarkan target sebaran nasional capaian kinerja sangat tinggi yakni sebesar 120,71 %.

Target Renstra tidak tercapai karena target terlalu tinggi. Realisasi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mengalami peningkatan secara signifikan yakni Rp. 12,61 Triliun dengan capaian sebesar 182,83 % yang disebabkan adanya akumulasi pelaporan dari pelaku usaha karena selama tiga tahun pandemi tidak melaporkan kegiatan usahanya. Hal tersebut yang menyebabkan target Renstra dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 mengalami peningkatan. Sedangkan realita yang ada di lapangan banyak faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai target yang telah ditetapkan Renstra.

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA	Triliun	6.7	3.7	55,68%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA	6.078.333	6.911.044	3.702.945	12.617.305	3.730.442.195.540	93,99	104,59	54,84	182,83	55,68

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja sd Tahun			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA	6,7 T	6,8 T	6,9 T	7 T	3.730.442.195.540	-	-	-

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa **target akhir Renstra** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”** dan capaian masuk kategori rendah. Meskipun demikian untuk **target nasional** capaian kinerja **“Tercapai”** sebesar 120,7 % dari target realisasi investasi nasional yang ditetapkan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.3.091.410.420.000,-.Triliun dan capaian masuk kategori sangat tinggi.

Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat memegang peran yang cukup penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah investor yang menanamkan modalnya menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tentunya kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, dan dibutuhkan langkah dan strategi yang jitu, terutama upaya promosi dan kemudahan dalam pengurusan perizinan, untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Daerah Kotawaringin Barat.

Kegiatan promosi merupakan bagian dari pemasaran, dimana keberhasilannya sangat ditentukan oleh akurasi data produk unggulan yang menjadi peluang investasi yang ditawarkan, besarnya biaya yang dikeluarkan calon investor dalam memproses perizinan, ketersediaan

bahan baku, keamanan, kemudahan akses pasar tujuan ekspor serta ketersediaan infrastruktur jalan, listrik dan air. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah data yang terkait produk, harga dan tempat pengidentifikasiannya serta pengemasannya untuk di publikasikan kepada calon investor.

Lemahnya data base yang dimiliki oleh instansi teknis atau sektoral di daerah dan tidak valid, merupakan salah satu kelemahan dalam publikasi dan promosi yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Daerah. Karena sebaik apapun rencana promosi yang dipersiapkan, dan seindah apapun pengemasan bahan promosi dibuat dan dicetak, tidak akan mampu menarik minat calon investor. Untuk itu, langkah dasar yang perlu dilakukan daerah, sebelum berpromosi adalah penyempurnaan data base peluang investasi daerah.

Pemerintah telah berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan reformasi, yang terlihat dari banyaknya aturan yang telah diberlakukan, termasuk aturan terkait pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kelembagaan ini dibentuk dengan harapan untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam proses perizinan, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan pemerintah ini, tidaklah serta merta dapat berjalan seperti yang diharapkan. Karena upaya ini menyangkut pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan.

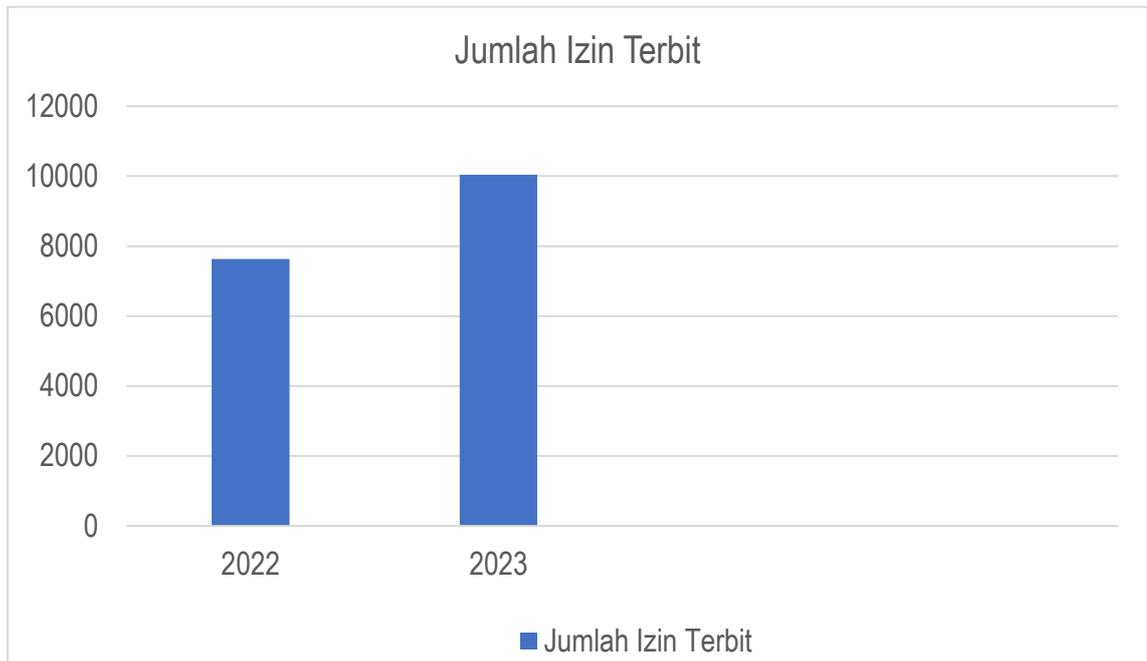
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya penyederhanaan penyelenggaraan perizinan ini telah menerbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha baik calon pemilik perusahaan dan investor untuk mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan adanya layanan program OSS (*Online Single Submission*) ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan berusaha. Saat ini mengurus izin sudah didukung dengan teknologi informasi sehingga ketepatan, kecepatan, dan kapasitas penyelesaian semua izin menjadi lebih baik.

Pada sistem OSS ini investor mengajukan permohonan perizinan berusaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah berada dalam satu sistem yang bernama OSS (*One Single Submission*). Data investor yang sudah teregistrasi selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus perizinan sehingga tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain. Bahkan investor tidak harus datang ke Kementerian teknis untuk menyerahkan dokumen, tetapi dapat mendaftar secara online. Hadirnya kebijakan ini cukup meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan investasinya.

Pada Tahun 2022 total perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sebanyak 7.628 izin. Pada Tahun 2023 total perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sebanyak 10.041 izin. Hal ini bisa dilihat berdasarkan diagram di bawah ini :

Diagram 3.1 Diagram Jumlah Izin Terbit



Berdasarkan diagram di atas jumlah izin terbit di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Artinya, dari tahun ke tahun animo pelaku usaha dalam mengurus izin semakin bertambah. Peningkatan jumlah izin terbit tersebut juga bisa disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha tentang pentingnya mengurus izin untuk kegiatan usaha atau pun untuk keperluan izin lainnya.

Jumlah izin dan nonperizinan yang diterbitkan tersebut, tentunya bukanlah menjadi satu-satunya indikator keberhasilan di dalam mendorong tumbuhnya investasi daerah. Untuk itu, perlu upaya secara sistematis dan komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Banyak unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, mulai dari aspek manusianya, sarana dan prasarana sampai pemanfaatan teknologi informatika. Unsur inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan jika ingin meningkatkan daya saing daerah dalam mendorong minat investor untuk berinvestasi.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa pelaku usaha yang belum memahami perubahan sistem OSS Versi 1.1 ke OSS-RBA sehingga mempengaruhi proses pelaporan LKPM Online.
2. Ada beberapa pelaku usaha yang sudah melaporkan nilai realisasi investasi pada LKPM Online, namun pelaporan tersebut belum disetujui oleh BKPM sehingga nilai realisasi tersebut tidak dapat dihitung.
3. Kurang tertibnya pelaku usaha dalam melaporkan LKPM Online sesuai periode pelaporan.
4. Adanya perubahan regulasi dalam hal kewajiban pelaku usaha melaporkan LKPM Online yang saat ini dimulai pada skala usaha kecil dengan nilai investasi dimulai pada 1 Miliar keatas. Sedangkan pada regulasi sebelumnya, skala usaha kecil dimulai dari nilai investasi sebesar 50 juta dan sudah diwajibkan untuk melaporkan LKPM Online.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 ini tidak tercapai kinerjanya. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi untuk tahun anggaran berikutnya.
2. Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Bupati) mengenai pemberian fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
4. Melaksanakan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah.

5. Melaksanakan upaya evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
6. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
7. Selalu membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar ketentuan penggunaan yang berlaku.
8. Memperbaiki intensitas koordinasi antara pemangku kebijakan Penanaman Modal dengan Pelaku usaha, melakukan pendampingan pelaporan LKPM secara lebih riil sesuai dengan kegiatan perusahaan.
9. Mengirimkan surat pemberitahuan pada pelaku usaha setiap periode pelaporan agar lebih tepat waktu dalam penyampaian pelaporan LKPM.

2

Sasaran: Meningkatnya pelayanan perizinan target kinerja sebesar 84 dan realisasi kinerja sebesar 95,28 dengan capaian kinerja sebesar 113,96 % atau sangat tinggi.

Keberhasilan sasaran strategis 2 (dua) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja 2 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan	%	84	95,28	113,96

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan	89,91	92,02	90,01	90,78	84	99,90	96,86	93,76	91,70	113,96

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra				Realisasi Kinerja sd Tahun 2022			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan	84	85	86	87	95,28	-	-	-

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tercapai”**.

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2023 yaitu semester I dan semester II, kondisi permasalahan atau kekurangan dari unsur pelayanan terdiri dari waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat karena masih bergantung dengan dinas teknis terkait dan persyaratan pelayanan masih dianggap sulit dan belum terbuka. Namun secara keseluruhan nilai layanan dan per unsur layanan masih dalam mutu pelayanan A. Secara umum kualitas layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dipersepsikan baik oleh masyarakat. Meskipun unsur-unsur pelayanan baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dan unsur yang kurang baik perlu perbaikan lagi.

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penunjang sarana dan prasarana seperti tersedianya ruang bermain anak, ruang pengaduan, *smooking room* dan disediakan komputer bagi masyarakat yang akan melakukan layanan mandiri di ruang pelayanan, karena tanpa disadari atau tidak peningkatan penunjang sarana dan prasarana mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Melayani secara profesional dan sepenuh hati serta memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan selalu menerapkan moto 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
3. Responsif terhadap setiap permasalahan dengan menyediakan fasilitas pengaduan berupa kotak saran/ pengaduan, nomor telepon yang bisa dihubungi, email dan terhubung dengan aplikasi SP4N LAPOR serta ruang pengaduan yang disediakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP secara online.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Mengupayakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai representasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang semakin berkualitas (penyederhanakan aturan-aturan dalam pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi).
4. Mengupayakan peningkatan secara terus menerus mutu pelayanan melalui Implementasi Standar Mutu.
5. Perbaikan berkelanjutan sarana dan prasarana /infrastruktur pelayanan publik (Sistem Perizinan Online Daerah, lokasi dan tempat layanan serta media publikasi).
6. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan maupun pelaku usaha terkait permohonan perizinan berusaha maupun perizinan non berusaha yang pengajuan permohonan perizinannya melalui aplikasi.
7. Melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan terkait dan standar pelayanan (SP) Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
8. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM JF Penata Perizinan baik dengan mengikutsertakan pada kegiatan Bimtek serta kegiatan diluar kedinasan.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan, mempercepat masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha khususnya agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan proses perizinan secara online. Melakukan pendampingan pelaporan LKPM secara lebih riil sesuai dengan kegiatan perusahaan.
2. Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan,

akuntabel, berkualitas dan terpercaya sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

3. Penyelenggaraan *in-house training* dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM secara konsisten.
4. Adanya petugas yang mendampingi masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus perizinan melalui OSS, SIMBG dan Si Cantik karena tidak semua masyarakat/pelaku usaha mengerti tentang perizinan secara online.
5. Adanya Layanan secara daring melalui Hallo PTSP yang dilakukan melalui layanan whatsapp di nomor 081352037700 (layanan di jam kerja) untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi dan perbantuan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.
6. Membuka Gerai layanan OSS RBA pada kegiatan-kegiatan DPMPTSP pada saat Kobar Exspo 2023 di Pangkalan Bun Park.
7. Membuka Layanan OSS RBA dan perizinan diluar OSS RBA di 6 Kecamatan (Kecamatan arut Selatan, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama) tahun 2023.
8. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis PTSP terkait Perizinan dan nonperizinan.
9. Mendampingi Tim Teknis PTSP dari Dinas Teknis untuk survey lapangan terkait permohonan perizinan dan nonperizinan.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari beberapa indikator kinerja, capaian kinerja yang dapat di sandingkan dengan target/standar nasional adalah:

Tabel: 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Renstra	Capaian Kinerja	Realisasi Provinsi	Capaian Kinerja Provinsi	Realisasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Capaian Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta)	3.730.442.195.540	55,68 %	19,10 triliun rupiah	118,7 %	1.418,9 triliun rupiah	101,3 %

Kontribusi realisasi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap capaian realisasi investasi Provinsi sebesar 19,37 %. Kontribusi realisasi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap capaian realisasi investasi secara nasional sebesar 0,26 %.

Perbandingan realisasi kinerja disandingkan dengan Kabupaten sekitar. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan daerah sekitar Kotawaringin Barat.

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi dengan capaian Kabupaten sekitar

Uraian	Kotawaringin Barat	Kotawaringin Timur	Gunung Mas	Seruyan
Realisasi Investasi	3,730 triliun rupiah	5,757 triliun rupiah	1,17 triliun rupiah	900,648 miliar rupiah

Secara umum bila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah maka realisasi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 3,73 triliun rupiah lebih tinggi dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Seruyan, namun masih di bawah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.11 Efisiensi Anggaran 2023

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan dan nonperizinan	94	95,28	113,96%	Rp. 130.481.300	Rp. 126.311.862	96,80	3,2
Total Efisiensi Anggaran								3,2

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran tahun 2023 diatas dapat diketahui:

Realisasi anggaran yang digunakan untuk untuk mencapai sasaran 2 sebesar Rp. 126.311.862,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 130.481.300,00 atau 96,80%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber

dana dalam mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.169.438,00 atau 3,2 %.

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan, persamaan anggaran yang diusulkan dan yang disetujui, partisipasi penyusun anggaran, penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Selain dari sisi anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut :

Tabel: 3.12 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan	Dikbud, PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan, Kesbangpol	Fasilitasi Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan	Mendukung pencapaian target kinerja Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan

Sumber: Data diolah

3.5. Inovasi dan Penghargaan yang Diraih

Terkait Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Sosialisasi

Inovasi yang telah dilakukan Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya melaksanakan sosialisasi ke setiap kecamatan di Kotawaringin Barat terkait perizinan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Sicantik Cloud yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh aparatur di kecamatan serta masyarakat sehingga kepatuhan pengurusan dan administrasi perizinan semakin baik kedepannya.

2. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengadakan mesin antrian guna meningkatkan pelayanan terbaik demi kenyamanan pengunjung/ masyarakat yang mengurus perizinan di kantor. Selain dari pengadaan mesin antrian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membangun *smooking room* demi kenyamanan pelayanan perizinan dan merupakan perwujudan dari *excellent service*. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas seperti tempat dan jalan parkir, kursi roda serta mendahulukan pelayanan bagi mereka.

3. Layanan Hallo PTSP

Layanan Hallo PTSP yaitu informasi digital menggunakan aplikasi WhatsApp yang dapat dengan cepat memberikan layanan informasi secara otomatis kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Gambar 3.1 Layanan Hallo PTSP



4. LaPer BOSS (Layanan Perizinan Berbasis OSS)

Laper BOSS merupakan layanan perizinan berbasis OSS untuk pelaku UMKM dengan output NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dilakukan secara on site/ langsung. Layanan ini tersedia di event-event besar seperti Kobar Expo, Temu Usaha, kunjungan ke Kecamatan, dan lain-lain.

Gambar 3.2 LaPer BOSS (Layanan Perizinan Berbasis OSS)



5. One Day Service

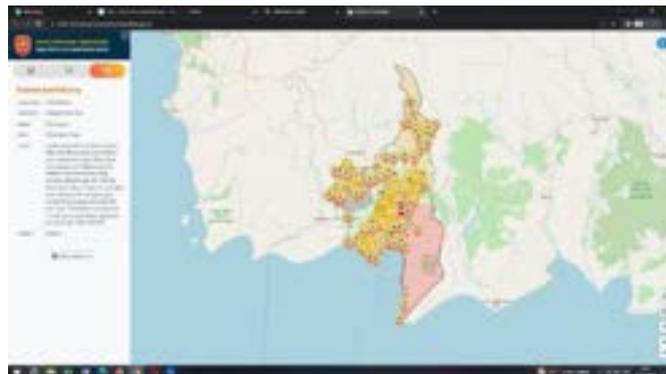
Membuat inovasi *one day service* (perizinan 1 hari) bagi izin-izin yang tidak memerlukan peninjauan lokasi bisa diterbitkan secara langsung tanpa verifikasi dinas teknis. One Day Service mempercepat proses pelayanan perizinan khususnya untuk izin pengumpulan uang dan barang, surat keterangan penelitian, NIB (Nomor Induk Besar/ Izin Usaha), Perizinan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan.

6. Inovasi Peta Potensi Investasi Melalui Web DPMPTSP

Peta potensi investasi melalui web DPMPTSP sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mengolah data potensi seluruh Kabupaten/ Kota se-Kotawaringin Barat dan sebagai media

informasi resmi terkait potensi dan peluang investasi juga memberikan kemudahan kepada para investor memperoleh informasi potensi dan peluang investasi serta memberikan visualisasi ketersediaan data potensi dan peluang investasi secara nasional.

Gambar 3.3 Peta Potensi Investasi Melalui Web DPMPSTSP



7. Penghargaan dari Ombudsman RI

Piagam penghargaan dari Ombudsman RI dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berhasil memenuhi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dan mendapatkan zona kepatuhan tinggi (zona hijau) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat telah menunjukkan komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 3.4 Gambar penghargaan dari Ombudsman



3.6. Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 6.647.198.000 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp. 6.759.020.000. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.412.698.796 atau sebesar 94,88%. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel: 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional			
	- Belanja Pegawai	4.571.628.195	4.402.152.323	96,29
	- Belanja Barang/Jasa	1.894.011.128	1.720.722.817	90,85
2	Belanja Modal			
	- Belanja Peralatan & Mesin	94.505.677	93.931.250	99,39
	- Belanja Gedung & Bangunan	198.875.000	195.892.406	98,50
	TOTAL	6.759.020.000	6.412.698.796	94,88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.14 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.746.733.367	5.529.026.473	96,21
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.775.608	87.564.132	93,38
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.322.608	39.316.820	88,71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.497.250	1.297.250	51,95
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.505.500	2.505.500	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.497.250	2.497.250	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.752.500	1.750.500	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	37.698.900	37.693.212	99,98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.501.600	2.501.600	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.622.566.429	4.452.152.323	96,29
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.571.628.195	4.402.152.323	96,29
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.865.000	8.865.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.574.984	40.401.625	99,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.498.250	1.498.250	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.836.000	54.517.560	80,37
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.800.000	19.800.000	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.036.000	34.717.560	72,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.005.019	308.119.330	95,69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.929.596	7.929.472	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.188.421	58.187.901	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.167.406	7.167.333	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.050.000	25.050.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.669.596	209.784.624	93,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.505.677	233.258.500	98,76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.505.677	93.931.250	99,39
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.686.883	259.711.847	96,66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.578.883	88.993.890	96,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.758.000	170.717.957	92,30
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.357.751	272.265.156	97,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.072.751	41.962.750	95,21
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.410.000	34.410.000	100
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198.875.00	195.892.406	98,50
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	156.834.012	127.231.052	81,12
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	129.334.012	99.736.052	77,12
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	129.334.012	99.736.052	77,12
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	27.500.000	27.495.000	99,69
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	27.500.000	27.495.000	99,64
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	229.931.321	213.928.390	99,98
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	229.931.321	213.928.390	93,04
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	229.931.321	213.928.390	93,04
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	130.481.300	126.311.862	96,80
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	130.481.300	126.311.862	96,80
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	52.620.800	51.693.112	98,24
Pemantauan Pemenuhan Komitmen	69.471.000	66.229.700	95,33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.389.500	8.389.050	99,99
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	450.500.000	371.774.707	82,52
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50.500.000	371.774.707	82,52
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	372.955.000	299.713.707	80,36
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	77.545.000	72.061.000	92,93
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	44.540.000	44.426.312	99,74
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	44.540.000	44.426.312	99,74
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44.540.000	44.426.312	99,74
TOTAL	6.759.020.000	6.412.698.796	94,88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar 94,88% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.

BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023 berdasarkan **target Renstra** sebesar 84,82% dengan peringkat kinerja **tinggi**. Sedangkan berdasarkan **target sebaran nasional** untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 117,34 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 94,88% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.412.698.796 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Prosedur perijinan selalu mengacu pada kaidah waktu dan kaidah teknis prosedur perijinan sangat linear sehingga memerlukan waktu sangat panjang dan prosesnya cukup rumit;
2. Biaya tarif retribusi (PBG) masih dianggap cukup mahal;
3. Masih kurangnya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan publik sesuai standard dari Kemenpan RB;
4. Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja Bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya ahli komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain.
5. Rendahnya minat investor PMA dan PMDN.
6. Kurangnya sosialisasi dan promosi investasi.
7. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi PMA dan PMDN.
8. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi terhadap

pelayanan perijinan secara online.

9. Investasi masih tergantung ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA).

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan pada Perusahaan baik PMA maupun PMDN;
2. Meningkatkan disiplin, etos kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada;
4. Melakukan sosialisasi terkait perizinan dan peraturan Perundang - undangan;
5. Meningkatkan promosi dan minat investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang signifikan;
6. Memberikan kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sesuai standar;
8. Menyelenggarakan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin;
9. Melibatkan seluruh aparatur untuk berperan serta dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*;
9. Melaksanakan pengembangan aplikasi secara bertahap guna meningkatkan informasi promosi dan sistem informasi pelayanan;
10. Mengirimkan/ mengikutsertakan secara bertahap Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat

meningkatkan kompetensi kinerja pegawai dan menambah jumlah personel/pegawai guna peningkatan pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 29 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



Ir. KAMALUDIN, M.Si

NIP. 19650105 199403 1 010

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 973/DIA/SK/DPMPTSP.A

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diperlukan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik; bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan instrumen pertanggung jawaban
- b. dan sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2022 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 87 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tala Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 – 2026 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan ada perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 2 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 973/ /SK/DPMPTSP.A

Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2023 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET TAHUN				SUMBER DATA	PENGAMPUH
				2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya nilai investasi PMDN dan PMA	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA	6,7 Trilyun	6,8 Trilyun	6,9 Trilyun	7 Trilyun	Renstra Perubahan DPMPTSP	Bidang Promosi PM, Bidang Perencanaan dan PIPM, Bidang Wasdal
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	Rata-rata Kepuasan Masyarakat = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur : Total Unsur yang Terisi X Nilai Penimbang	84	85	86	87	Renstra Perubahan DPMPTSP	Bidang PTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


E. H. KAMALUDDIN, M.Si
NIP. 1965010199403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Telpn (0532) 28064 / Fax (0532) 23057

Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112

Website : simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 050/444-DPMPTSP.A

TENTANG

Persiapan Penyusunan LKPJ, LPPD dan LKjIP Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan penyusunan LKPJ, LPPD dan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, dengan ini diinstruksikan kepada masing – masing Bidang untuk :

- PERTAMA** : - Masing - masing Bidang/ Kasubag/ Kasi yang melaksanakan kegiatan agar membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dengan melampirkan data dukung capaian kegiatan dan penjelasan terkait hambatan/ permasalahan tidak tercapainya realisasi keuangan dibawah 95% dan realisasi fisik dibawah 100% serta uraian strategi sehingga Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai/ melampaui target yang telah ditentukan;
- Masing-masing Pejabat Eselon membuat rencana aksi, progres rencana aksi dengan melampirkan data dukung atas capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bahan lampiran untuk penilaian Sakip Tahun 2023.
- Agar seluruh Staf/ Pelaksana untuk membuat Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.
- KEDUA** : Tambahan untuk Bidang Pengawasan dan Pengendalian disiapkan data Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp. Juta) baik realisasi per bulan maupun per Triwulan dan juga rincian realisasi Indikator sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 halaman 228.
- KETIGA** : Tambahan untuk Bidang PTSP menyiapkan :
1. Data Permohonan Perizinan dan Non Perizinan
 2. Data Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan selama tahun 2023 beserta jumlah Investasinya
 3. Data Perizinan dan Non Perizinan yang ditolak
 4. Data Perizinan dan Non Perizinan yang dicabut
 5. Data survey IKM yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 dan upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan Kepuasan Konsumen.
 6. Jumlah pengaduan yang telah ditangani
 7. Penghargaan yang telah diterima oleh DPMPTSP dari Kementrian/ Lembaga
- KEEMPAT** : Demi kelancaran penyusunan LKPJ, LPPD dan LKjIP tahun 2023 agar laporan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. Perencanaan dan Pengendalian Program paling lambat tanggal 30 Desember 2023.

Agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Pangkalan Bun, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS

Ir. KAMARUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640105 19943 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. KAMALUDIN, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si**

Jabatan : PJ. Bupati Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si



Kotawaringin Barat, Januari 2024

Pihak Pertama

Ir. KAMALUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650105 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP : 19650105 199403 1 010
PANGKAT/ GOL : Pembina Utama Muda /IV/c
JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				1	2	3	4	JML
1	2	3	4	5				6
1	Meningkatnya nilai investasi PMDN dan PMA	Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	Trilyun	1,7	1,7	1,7	1,7	6,8
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	%				85	85

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.414.774.050	APBD
2	Program pengembangan iklim penanaman modal	156.833.700	APBD
3	Program promosi penanaman modal	235.119.750	APBD
4	Program pelayanan penanaman modal	133.731.000	APBD
5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	595.257.000	APBD
6	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	44.508.900	APBD

Pihak Kedua,



Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si



Kotawaringin Barat, Januari 2024
Pihak Pertama

Ir. KAMALUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HEPPY SEPTIANA**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. KAMALUDIN, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selaku atasan pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

Kotawaringin Barat, Januari 2024
Pihak Pertama,

Ir. HEPPY SEPTIANA
Pembina Tk. I
NIP. 196709201993032010

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : Ir. HEPPY SEPTIANA
NIP : 196709201993032010
PANGKAT/GOL : Pembina Tk. I /IV/b
JABATAN : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME				
				1	2	3	4	JML
1	2	3	4	5				6
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	25	25	25	25	100
2	Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	25	25	25	25	100
3	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	25	25	25	25	100
4	Ketepatan penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	25	25	25	25	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.414.774.050	APBD
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.025.398	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.060.551.528	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.696.150	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	133.164.000	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.759.251	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324.332.232	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.932.016	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.081.313.475	APBD
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Gedung DPMPSTP	934.705.160	APBD

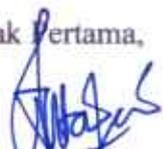
Kotawaringin Barat, Januari 2024

Pihak Kedua,



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650105 199403 1 010

Pihak Pertama,



Ir. HEPPY SEPTIANA
 Pembina Tk. I
 NIP. 196709201993032010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPITRI HANDEYANIE, SAP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. KAMALUDIN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Januari 2024
Pihak Pertama

SUPITRI HANDEYANIE, SAP, M.Si
Pembina
NIP. 197111221996032004

Pihak Kedua

Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembinaan Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : SUPITRI HANDAYANIE, SAP, M.Si
NIP : 197111221996032004
PANGKAT/ GOL. : Pembina /IV/a
JABATAN : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME				
				1	2	3	4	JML.
1	2	3	4	5				6
1	Terwujudnya Program Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Laporan Pemetaan Potensi Investasi	%	25	25	25	25	100

I	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	156.833.700	APBD
1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	116.833.800	APBD
2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	39.999.900	APBD



Pihak Kedua
Ir. KAMALUDIN, M.Si
 Pembinaan Utama Muda
 NIP. 19650105 199403 1 010

Kotowaringin Barat, Januari 2024
 Pihak Pertama

SUPITRI HANDAYANIE, SAP, M.Si
 Pembina
 NIP. 197111221996032004



PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRIANI YULIANTI, ST., MT**

Jabatan : Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir.KAMALUDIN,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Januari 2024
Pihak Pertama,


FITRIANI YULIANTI, ST., MT
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820724 200903 2 009

Pihak Kedua,


Ir.KAMALUDIN,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650105 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2024

NAMA : Fitriani Yulianti, ST., MT
NIP. : 19820724 200903 2 009
PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I /III/d
JABATAN : Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	%	-	-	-	98	98

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibanding Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	133.731.000,00	APBD

Kotawaringin Barat, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650105 199403 1 010

Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu


FITRIANI YULIANTI, ST., MT
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820724 200903 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSITA WATI, SP., MH.**

Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. KAMALUDIN, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku atasan
pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

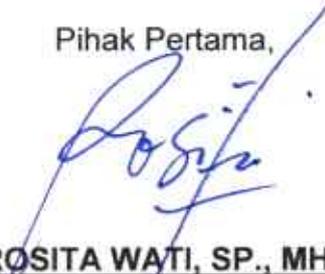
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotawaringin Barat, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

Pihak Pertama,

ROSITA WATI, SP., MH.
Pembina
NIP. 19710724 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : ROSITA WATI, SP., MH.
 NIP : 19710724 199903 2 001
 PANGKAT / GOL : PEMBINA / IV a
 JABATAN : KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 TAHUN : 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT / OUTCOME				
				1	2	3	4	JUMLAH
1	2	3	4	5				6
1	Terlaksananya promosi penanaman modal tingkat daerah dan tingkat nasional	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	%	17	25	25	25	92
2	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	%	20	25	25	25	95

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		APBD
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	235.119.750	APBD
II.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		APBD
1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.508.900	APBD

Kotawaringin Barat, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. KAMALUDIN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650105 199403 1 010

Pihak Pertama,

ROSITA WATI, SP., MH.
 Pembina
 NIP. 19710724 199903 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSITA WATI, SP., MH.**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. KAMALUDIN, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. KAMALUDIN, M.Si.

NIP. 19650105 199403 1 010

Pihak Pertama,

ROSITA WATI, SP., MH.

NIP. 19710724 199903 2 001

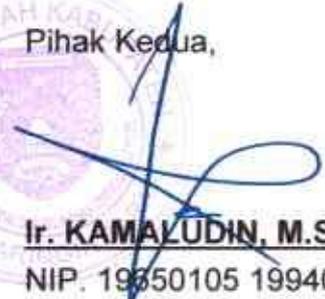
PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : ROSITA WATI, SP., MH.
NIP : 19710724 199903 2 001
PANGKAT/GOL : Pembina / IV.a
JABATAN : Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				1	2	3	4	JML
1	2	3	4	5				6
1	Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu dan melengkapi legalitas usahanya	%	76	76	76	76	76

No.	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	595.257.000	APBN

Pangkalan Bun, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. KAMALUDIN, M.Si.
NIP. 19650105 199403 1 010

Pihak Pertama,

ROSITA WATI, SP., MH.
NIP. 19710724 199903 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. KAMALUDIN, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. H BUDI SANTOSA, M.Si**

Jabatan : PJ. Bupati Kotawaringin Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Drs. H BUDI SANTOSA, M.Si



Kotawaringin Barat, November 2023

Pihak Pertama

Ir. KAMALUDIN, M.Si

Pembinaan Utama Muda

NIP. 19650105 199403 1 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : Ir. KAMALUDIN, M.Si
 NIP : 19650105 199403 1 010
 PANGKAT/ GOL : Pembina Utama Muda /IV/c
 JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				1	2	3	4	JML
1	2	3	4	5				6
1	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Realisasi Penanaman Modal (Jumlah realisasi nilai investasi PMDN dan PMA)	Rp (T)	1,1 T	1,85 T	1,85 T	1,9 T	6,7 T
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	%				84	84

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	5.746.733.367	APBD
2.	Program pengembangan iklim penanaman modal	156.834.012	APBD
3.	Program promosi penanaman modal	229.931.321	APBD
4.	Program pelayanan penanaman modal	130.481.300	APBD
5.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	450.500.000	APBD
6.	Program pengelola data dan sistem informasi penanaman modal	44.540.000	APBD

Pihak Kedua



Dr. Drs. H BUDI SANTOSA, M.Si

Kotawaringin Barat, November 2023
Pihak Pertama



Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembinaan Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HEPPY SEPTIANA**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. KAMALUDIN, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sefaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

Kotawaringin Barat, November 2023

Pihak Pertama

Ir. HEPPY SEPTIANA
Pembina Tk. I
NIP. 19670920 199303 2 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : Ir. HEPPY SEPTIANA
NIP : 19670920 199303 2 010
PANGKAT/ GOL : Pembina TK. I /IV/b
JABATAN : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME				
				1	2	3	4	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>				<i>6</i>
1	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Penunjang Perangkat Daerah	%	25	25	25	25	100

1	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.746.733.367	APBD
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.632.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.529.815.413	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.316.000	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.219.127	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.505.677	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.156.378	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.397.751	APBD



Pihak Kedua
Ir. KAMALUDIN, M.Si
 Pembinaan Utama Muda
 NIP. 19650105 199403 1 010

Kotawaringin Barat, November 2023
 Pihak Pertama

Ir. HEPPY SEPTIANA
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670920 199303 2 010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

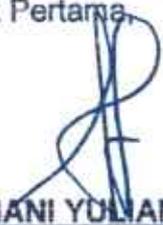
Nama : **FITRIANI YULIANTI, ST., MT**
Jabatan : Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir.KAMALUDIN,M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Ir.KAMALUDIN,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650105 199403 1 010

Kotawaringin Barat, Oktober 2023
Pihak Pertama,

FITRIANI YULIANTI, ST., MT
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820724 200903 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2023**

NAMA : Fitriani Yulianti, ST., MT
 NIP : 19820724 200903 2 009
 PANGKAT/GOL : Penata Tingkat I /III/d
 JABATAN : Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	%	-	-	-	98	98

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.481.300,00	APBD



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. KAMALUDIN, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19650105 199403 1 010

Kotawaringin Barat, Oktober 2023

Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu

FITRIANI YULIANTI, ST., MT
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19820724 200903 2 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSITA WATI, SP., MH.**

Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. KAMALUDIN, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

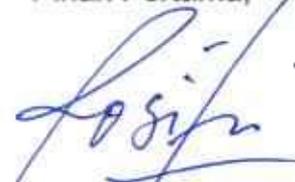
Kotawaringin Barat, Oktober 2023

Pihak Kedua,



Ir. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

Pihak Pertama,



ROSITA WATI, SP., MH.
Pembina
NIP. 19710724 199903 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : ROSITA WATI, SP., MH.
 NIP : 19710724 199903 2 001
 PANGKAT / GOL : PEMBINA / IV.a
 JABATAN : KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 TAHUN : 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				1	2	3	4	JUMLAH
1	2	3	4	5				6
1	Terlaksananya promosi penanaman modal tingkat daerah dan tingkat nasional	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	%	22,5	22,5	22,5	22,5	90
2	Terlaksananya pengelolaan data yang terintegrasi	Persentase data yang terintegrasi pada system Informasi penanaman modal yang dikelola	%	10	15	15	20	60

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		APBD
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	229.931.321	APBD
II.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		APBD
1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.540.000	APBD

Kotawaringin Barat, Oktober 2023

Pihak Kedua,



Ir. KAMALUDIN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650105 199403 1 010

Pihak Pertama,



ROSITA WATI, SP., MH.
 Pembina
 NIP. 19710724 199903 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSITA WATI, SP., MH.**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. KAMALUDIN, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. KAMALUDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650105 199403 1 010

ROSITA WATI, SP., MH.

Pembina

NIP. 19710724 199903 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : ROSITA WATI, SP., MH.
NIP : 19710724 199903 2 001
PANGKAT/GOL : Pembina / IV.a
JABATAN : Plt. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN : 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME				
				1	2	3	4	JML
1	2	3	4	5				6
1	Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	%	71	71	71	71	100
		Persentase pemantauan dan pengawasan penanaman modal dan perizinan	%	25	25	25	25	100
		Persentase peserta yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal	%	66,67		33,33		100

No.	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	450.500.000	APBN

Pangkalan Bun, Oktober 2023


 Pihak Kedua,
Ir. KAMALUDIN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650105 199403 1 010

Pihak Pertama,

ROSITA WATI, SP., MH.
 Pembina
 NIP. 19710724 199903 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPITRI HANDAYANIE, SAP, M.SI
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. KAMALUDIN, M.SI
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kotawaringin Barat, Oktober 2023
Pihak Pertama



SUPITRI HANDAYANIE, SAP, MSI
Pembina
NIP. 197111221996032004

PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI

NAMA : SUPITRI HANDAYANIE, SAP, M.SI
 NIP : 197111221996032004
 PANGKAT/GOL : Pembina /IV/a
 JABATAN : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 TAHUN : 2023

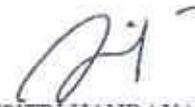
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/ OUTCOME				
				1	2	3	4	JML
1	2	3	4	5				6
1	Terwujudnya Program Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Laporan Pemetaan Potensi Investasi	%	25	25	25	25	100

1	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	156.834.204	APBD
1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	129.334.012	APBD
2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	27.500.000	APBD



Pihak Kedua
 Ir. KAMALUDDIN, M.SI
 Pembinaan Utama Muda
 NIP. 19650105 199403 1 010

Kotawaringin Barat, Oktober 2023
 Pihak Pertama



SUPITRI HANDAYANIE, SAP, M.SI
 Pembina
 NIP. 197111221996032004

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2024

Unit Kerja : DPMPTSP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 Jabatan : KABID Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Nama : SUPITRI HANDAYANIE, SAP,

NO	Program	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Produk Hukum dan dokumen pemetaan Potensi Investasi	√ 25%	√ 25%	√ 25%	√ 25%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan			Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III			
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum DPMPTSP	√	√	√	√	-	-	-	Nilai pagu Rencana Kerja : Rp. 116.833.800	-	-
2	Penyusunan dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data potensi investasi	-	-	√	√	-	-	-	Nilai pagu Rencana Kerja : Rp. 39.999.900,-	-	-

Pangkalan Bun, Januari 2024
 Kabid Perencanaan dan PIPM


 SUPITRI HANDAYANIE, SAP, M.Si
 NIP. 19711122 199603 2 004

RENCANA AKSI ESEON III TAHUN 2024

Unit Kerja: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jabatan: Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nama: Fitriani Yulianti, ST., MT
Program: Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan: Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah KabupatenKota

NO	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan	98%				98%				

No	Aksi	Indikator	Target	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian	
				I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Terlaksananya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha				500								
2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha	500 Kegiatan Usaha				500								
3	Terlaksananya Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	500 Pelaku Usaha				500								

Pangkajene, 08 Agustus 2024
 Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu


FITRIANI YULIANTI, ST., MT
 NIP. 19820724 200803 2 009

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2024

Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jabatan : KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Nama : ROSITA WATI, SP., MH.

No.	Program	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1	Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	17%	25%	25%	25%
2	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	20%	25%	25%	25%

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan			
			I	II	III	IV
A	Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan					
1	Koordinasi dengan Instansi/SKPD, Perusahaan terkait Bahan/Materi Pameran	2 Dokumen				
2	Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk Kelukutsertaan Pameran	2 Kali				
3	Mengikuti Pameran Tingkat Daerah dan Tingkat Nasional	2 Kali				
4	Menyusun Laporan keikutsertaan Pameran	1 Laporan				
5	Melaksanakan Promosi melalui Website, Youtube, Media Sosial dan Media Cetak	12 Bulan				

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan			
			I	II	III	IV
B	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
1	Menyusun Laporan Pengelolaan Data Yang Terintegrasi	4 Laporan				

Pangkalan Bun, Januari 2024

KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL,


 ROSITA WATI, SP., MH.
 NIP. 19710724 199903 2 001

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2024

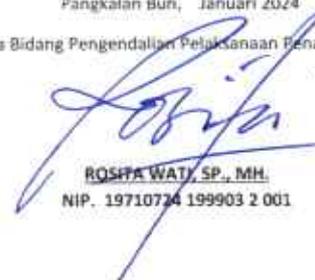
Unit Kerja : DPMPSTP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 Nama : ROSITA WATI, SP., MH.

No.	Program	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	76	76	76	76

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen KAK										Nilai Pagu Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 595.257.000,-		
2	Rapat internal Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terkait Program Kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan Rapat internal Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal												
3	Penyusunan Jadwal Pelaksanaan seluruh Kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Perusahaan yang akan dilakukan pendampingan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan										Penyusunan Perijinan Dasar Perizinan, LKPM		
5	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal dan perizinan										Banyak perusahaan / pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM, terlambat melaporkan LKPM, dan data yang tidak lengkap dalam melaporkan LKPM termasuk perizinan		
6	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Proyek/Kegiatan Usaha yang akan dilakukan pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan												
7	Koordinasi dengan Pelaku Usaha / Perusahaan terkait Penanaman Modal, Perizinan dan non perizinan	Terselenggaranya koordinasi dengan pelaku usaha												
8	Koordinasi dengan seluruh Instansi terkait baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat	Terselenggaranya koordinasi dengan Seluruh Instansi terkait baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat												
9	Penyusunan Laporan Akhir Program Kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen Laporan Akhir Program Kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal												

Pangkalan Bun, Januari 2024

Pt. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


 ROSITA WATI, SP., MH.
 NIP. 19710724 199903 2 001

RENCANA AKSI PERUBAHAN ESEON III TAHUN 2023

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Nama : Fitriani Yuliani, ST., MT
 Program : Pelayanan Penanaman Modal
 Kegiatan : Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

NO	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Tersedianya Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Pemudahan perizinan yang diberikan	98%				98%				99,50%

No	Aksi	Indikator	Target	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Tersedianya jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik	900 Pelaku Usaha				900				10.041	Tercapai	Tidak Ada	Tidak ada
2	Tersedianya jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300 Kegiatan Usaha				300				479	Tercapai	Tidak Ada	Tidak ada
3	Tersedianya jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	500 Orang				500				2.946	Tercapai	Tidak Ada	Tidak ada

Pangkajene Burea, Oktober 2023
 Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu


 FITRIANI YULIANI, ST., MT
 NIP. 19820724 200603 2 009

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2023 PERUBAHAN

Unit Kerja : DPMPPTSP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 Jabatan : KABID Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Nama : SUPITRI HANDAYANIE, S.A.P., M.Si.

NO	Program	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Minat Investasi	√	√	√	√
			25%	25%	25%	25%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Penyusunan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	√	√	√	√	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Nilai pagu Rencana Kerja : Rp. 129.334.012	-	-
2	Penyusunan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	-	-	-	√	-	-	-	1 Dokumen	Nilai pagu Rencana Kerja : Rp. 27.500.000	-	-

Pangkalan Bun, Oktober 2023
 Kabid Perencanaan dan PIPM


 SUPITRI HANDAYANIE, S.A.P., M.Si.
 NIP. 19711122.199603.2.004

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2023

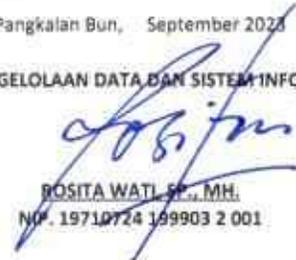
Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jabatan : KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 Nama : ROSITA WATI, SP., MH.

No.	Program	Indikator	Target				Realisasi			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	22,5	22,5	22,5	22,5	15	25	40	-
2	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	10	15	15	20	20	20	20	-

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan			Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III			
A Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan												
1	Koordinasi dengan Instansi/SKPD, Perusahaan terkait Bahan/Materi Pameran	2 Dokumen					1			Terlaksana sesuai jadwal	-	-
2	Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk Keluksertaan Pameran	2 Kali						2		Terlaksana sesuai jadwal	-	-
3	Mengikuti Pameran Tingkat Nasional	1 Kali							1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
4	Menyusun Laporan keluksertaan Pameran	1 Laporan							1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
5	Melaksanakan Promosi melalui Website, Youtube, Media Sosial dan Media Cetak	12 Bulan					3	3	3	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
B Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal												
1	Menyusun Laporan Pengelolaan Data Yang Terintegrasi	4 Laporan					1	1	1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-

Pangkalan Bun, September 2023

KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL,


 ROSITA WATI, SP., MH.
 NIP. 19710724 199903 2 001

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2023

Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jabatan : KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

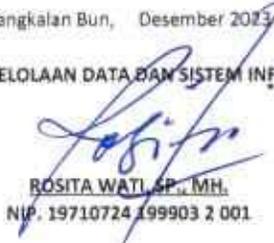
Nama : ROSITA WATI, SP., MH.

No.	Program	Indikator	Target				Realisasi			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	22,5	22,5	22,5	22,5	15	25	40	20
2	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang terintegrasi pada sistem informasi Penanaman Modal yang dikelola	10	15	15	20	20	20	20	15

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
A Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan													
1	Koordinasi dengan Instansi/SKPD: Perusahaan terkait Bahan/Materi Pameran	2 Dokumen					1			1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
2	Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk Keikutsertaan Pameran	2 Kali						2			Terlaksana sesuai jadwal	-	-
3	Mengikuti Pameran Tingkat Daerah dan Tingkat Nasional	2 Kali							1	1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
4	Menyusun Laporan keikutsertaan Pameran	2 Laporan							1	1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
5	Melaksanakan Promosi melalui Website, Youtube, Media Sosial dan Media Cetak	12 Bulan					3	3	3	3	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
B Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal													
1	Menyusun Laporan Pengelolaan Data Yang Terintegrasi	4 Laporan					1	1	1	1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-

Pangkalan Bun, Desember 2023

KEPALA BIDANG PROMOSI, PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL,


 ROSITA WATI, SP., MH.
 NIP. 19710724 199903 2 001

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2023

Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 Nama : ROSITA WATI, SP., MH.

No.	Program	Indikator	Target				Realisasi		
			I	II	III	IV	I	II	III
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	71%	71%	71%	71%	73,33%	72,22%	81,5%
		Persentase pemantauan dan pengawasan penanaman modal dan perizinan	25%	25%	25%	25%	17,24%	13,79%	30%
		Persentase peserta yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal	66,67%	-	33,33%	-	66,67%	33,33%	-

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan			Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III			
1	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen KAK					1	-	-	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
2	Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Penanaman Modal termasuk Perizinan dan Non Perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Laporan Data PMA / PMDN Perizinan dan Non Perizinan					1	1	1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
3	Pelaksanaan kegiatan pemantauan penanaman modal dan perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah perusahaan yang akan dilakukan pemantauan penanaman modal dan perizinan					0	0	0	-	Tidak tersedia anggaran pada sub kegiatan untuk mendukung pencapaian target program dan kegiatan	-
4	Pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman modal dan perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah kegiatan usaha yang akan dilakukan pengawasan penanaman modal dan perizinan					19	20	11	-	Karena adanya pengembangan system OSS akun pengawasan dengan penjadwalan tersistem yang melibatkan OPD teknis sehingga untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan SK dan SOP, ttd Bupati Kotawaringin Barat sehingga menunggu proses persiapan yang panjang	-

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan			Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III			
5	Pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase peserta yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal					66,67%	33,33%	-	-	-	-
6	Penyusunan Laporan Akhir program kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen Laporan Akhir program kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					-	-	-	-	-	-

Pangkalan Bun, September 2023

Pt. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,


 ROSITA WATI, SP. MH.
 NIP. 19710724 199903 2 001

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2023

Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jabatan : PIt. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 Nama : ROSITA WATI, SP., MH.

No.	Program	Indikator	Target				Realisasi			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	71%	71%	71%	71%	73,33%	72,22%	81,5%	94,44%
		Persentase pemantauan dan pengawasan penanaman modal dan perizinan	25%	25%	25%	25%	17,24%	13,79%	30%	112%
		Persentase peserta yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal	66,67%	-	33,33%	-	66,67%	33,33%	-	36%

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen KAK					1	-	-	-	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
2	Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Penanaman Modal termasuk Perizinan dan Non Perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Laporan Data PMA / PMDN Perizinan dan Non Perizinan					1	1	1	1	Terlaksana sesuai jadwal	-	-
3	Pelaksanaan kegiatan pemantauan penanaman modal dan perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah perusahaan yang akan dilakukan pemantauan penanaman modal dan perizinan					0	0	0	0	-	Tidak tersedia anggaran pada sub kegiatan untuk mendukung pencapaian target program dan kegiatan	-
4	Pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman modal dan perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah kegiatan usaha yang akan dilakukan pengawasan penanaman modal dan perizinan					19	20	11	34	-	-	-
5	Pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Persentase peserta yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal					66,67%	33,33%	-	36%	-	-	-
6	Penyusunan Laporan Akhir program kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen Laporan Akhir program kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					-	-	-	1	-	-	-

Pangkalan Bun, Desember 2023

PIT. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,


 ROSITA WATI, SP., MH.
 NIP. 19710724 199903 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	85%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	5.630.820.146
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	117.409.800
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	70.632.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2.497.250
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	2.505.500
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	2.497.250
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.752.500
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dok	35.023.700
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	2.501.600
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3547 Dokumen	4.529.815.413
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	4.469.362.163
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3500 Dokumen	5.500.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	53.455.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	1.498.250
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	73.316.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	33 Paket	19.800.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	53.516.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	5 Jenis	231.219.127
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	7.929.596
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	57.927.193
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.129.766
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 Paket	48.784.426
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Disediakan	8 Orang	109.448.146
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah yang diadakan	10 Unit	94.505.677
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	10 Unit	94.505.677
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	307.156.378
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/Paket yang Terkirim	12 Laporan	350.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	133.860.378
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172.946.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	277.397.751
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	7 Unit	44.072.751
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	34.450.000
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah Bangunan gedung yang direhab/ dipelihara	1 Unit	198.875.000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.630.820.146
II	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi PMA dan PMDN	1,5 T	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	71%	450.500.000
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	330 Perusahaan	450.500.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	119.309.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	230 Pelaku Usaha	253.646.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan Usaha	77.545.000
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Minat Investasi	90%	156.834.204

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program, Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	2 Dokumen	116.834.204
				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	116.834.204
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	1 Dokumen	40.000.000
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	235.199.750
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	2 Media Promosi	235.199.750
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	235.199.750
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	60%	41.696.800
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	4 Dokumen	41.696.800
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasisi sitim pelayanan perizinan berbasis terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	4 Laporan	41.696.800

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	
III	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang diterbitkan dalam Satu Tahun	98%	132.147.100	
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin dan non izin, pemantauan pemenuhan komitmen dan pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang dapat diselesaikan	3400 Buah	132.147.100	
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	49.886.600	
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan Usaha	73.871.000	
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Orang	8.389.500	
TOTAL PAGU KESELURUHAN								6.647.198.000

Pangkalan Bun, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kota Serangin Barat

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

**LAPORAN
SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT
TRIWULAN IV TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KALIMANTAN TENGAH**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	5
PENGUMPULAN DATA SKM.....	5
2.1 Pelaksana SKM.....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	6
2.5 Penentuan Jumlah Responden	7
BAB III	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	8
1.1 Jumlah Responden SKM	8
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	13
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	14
4.3 Tren Nilai SKM	15
BAB V	17
KESIMPULAN.....	17
LAMPIRAN.....	19-36
Hasil Olahan Data SKM.....	28-29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 060/85/ORGs tanggal 24 Agustus 2022 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kotawaringin Barat

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah tim yang ditunjuk oleh bidang ptsp

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner pada halaman portal survey kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan pada halaman portal survey yang telah disiapkan di ruang pelayanan . Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu periodic dengan jangka waktu (periode Keempat) yaitu tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 15 Desember 2023. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama kurang dari 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	2 Okt – 6 Okt 2023	5 hari
2.	Pengumpulan Data	9 Okt – 15 Des 2023	50 hari
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	18 Des - 22 Des 2023	5 hari
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	9 Oktober – 13 Oktober 2023	5 hari

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu satu periode (pelaksanaan survei dari 2 Oktober 2023 sampai 15 Desember 2023) adalah sebanyak 62 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM DPMPTSP tetap menggunakan jumlah 62 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

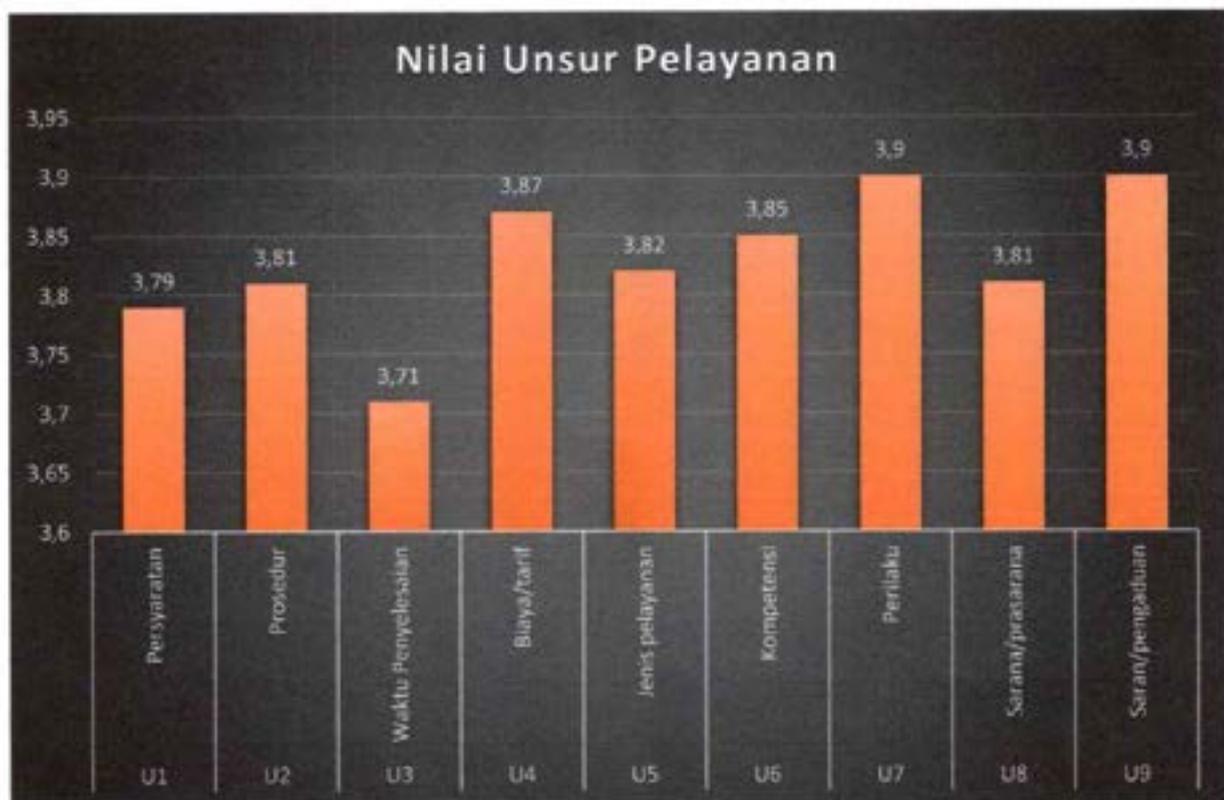
Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 62 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	26	42 %
		PEREMPUAN	36	58 %
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0 %
		SLTP	4	6 %
		SLTA	20	32 %
		DIII	9	14 %
		SI	28	45 %
		S2	1	3 %
3	PEKERJAAN	PNS	14	22 %
		TNI	1	3 %
		SWASTA	24	38 %
		WIRUSAHA	0	0 %
		LAINNYA	23	37 %

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3.79	3.81	3.71	3,87	3.82	3.85	3.9	3,81	3.9
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM	Unit									
Layanan										



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berikut dapat dilihat tabel dan grafik nilai unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang diurutkan dari nilai terendah ke nilai yang tertinggi :

	Nilai								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,79	3,81	3,71	3,87	3,82	3,85	3,9	3,81	3,9
IKM per unsur (Nilai)	94.75	95.25	92.75	96.75	95.5	96.25	97.5	95.25	97.5
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	95,72 (SANGAT BAIK)								

	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
			I	II	III	IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan penyelesaian izin	√	√	√	√	Bidang PTSP
2	Prosedur Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√	√	√	Bidang PTSP dan Dinas Terkait
3	Sarana dan Prasarana	Peningkatan dan Perbaikan Sistem dan Jaringan	√	√	√	√	DPMPPTSP

Berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai pada Unsur kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 92.75 . Unsur kecepatan pelayanan dinilai paling rendah nilainya prosentasenya sehingga perlu ditingkatkan. Unsur kecepatan pelayanan perlu adanya Kerjasama dengan dinas teknis terkait dan merumuskan Kembali sehingga mempermudah masyarakat dalam hal kecepatan pelayanan.
2. Sedangkan Unsur Persyaratan pelayanan mendapatkan nilai terendah kedua yaitu 94.75 dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan kepada Masyarakat, baik persyaratan teknis maupun administrative dibuat mudah dan terbuka.
3. Unsur Kesesuaian Produk layanan dengan nilai 95.5, dalam hal ini lebih meningkatkan kesesuaian produk layanan dari tim teknis agar dapat mempermudah Masyarakat dalam mengurus izin .
4. Unsur Kemudahan prosedur , dengan nilai 95.25 Unsur kemudahan prosedur dinilai sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan, Unsur kemudahan prosedur perlu adanya Kerjasama dengan dinas teknis terkait dan merumuskan Kembali sehingga mempermudah Masyarakat dala hal kemudahan prosedur.
5. Unsur Kualitas Saprass mendapatkan nilai yaitu 95.25 Unsur Pelayanan Kualitas Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan terutama dala hal internet / Wifi agar mempermudah pengguna layanan dalam melakukan pengisian melalui aplikasi.
6. Kompetensi Petugas dengan nilai 96.25 Unsur pelayanan Kompetensi Petugas dinilai sudah baik dan harus tetap ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa ketidak sesuaian hasil pelayanan dengan standar yang ditetapkan diakibatkan karena kurangnya kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

Berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai pada Unsur kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 92.75 . Unsur kecepatan pelayanan dinilai paling rendah nilainya prosentasenya sehingga perlu ditingkatkan. Unsur kecepatan pelayanan perlu adanya Kerjasama dengan dinas teknis terkait dan merumuskan Kembali sehingga mempermudah masyarakat dalam hal kecepatan pelayanan.
2. Sedangkan Unsur Persyaratan pelayanan mendapatkan nilai terendah kedua yaitu 94.75 dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan kepada Masyarakat, baik persyaratan teknis maupun administrative dibuat mudah dan terbuka.
3. Unsur Kesesuaian Produk layanan dengan nilai 95.5, dalam hal ini lebih meningkatkan kesesuaian produk layanan dari tim teknis agar dapat mempermudah Masyarakat dalam mengurus izin .
4. Unsur Kemudahan prosedur , dengan nilai 95.25 Unsur kemudahan prosedur dinilai sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan, Unsur kemudahan prosedur perlu adanya Kerjasama dengan dinas teknis terkait dan merumuskan Kembali sehingga mempermudah Masyarakat dala hal kemudahan prosedur.
5. Unsur Kualitas Saprass mendapatkan nilai yaitu 95.25 Unsur Pelayanan Kualitas Sarana dan Prasarana perlu ditingkatkan terutama dala hal internet / Wifi agar mempermudah pengguna layanan dalam melakukan pengisian melalui aplikasi.
6. Kompetensi Petugas dengan nilai 96.25 Unsur pelayanan Kompetensi Petugas dinilai sudah baik dan harus tetap ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa ketidak sesuaian hasil pelayanan dengan standar yang ditetapkan diakibatkan karena kurangnya kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Unsur kewajaran biaya dengan nilai 96.75 Unsur kewajaran biaya ini termasuk kategori sangat baik karena tidak ada biaya untuk semua layanan kecuali PBG dan Reklame yang telah ditentukan melalui PERDA Unsur Perilaku Petugas dengan nilai 96.25.
8. Unsur pelayanan Perilaku Petugas dengan nilai 97,5 sudah tergolong baik namun masih perlu ditingkatkan. Perilaku Petugas yang perlu ditingkatkan terkait kesopanan, keramahan dan komunikasi yang baik dari petugas/pelaksana pada saat berhadapan atau menangani konsumen/pelanggan
9. Unsur penanganan Pengaduan dengan nilai 97.5. Unsur Penanganan Pengaduan sudah tergolong kategori sangat baik, oleh karena itu harus tetap dipertahankan dan tetap ditingkatkan Hal ini terkait kesigapan dalam menangani dan menyelesaikan laporan/masalah terkait pelayanan yang diterima oleh konsumen/pengguna layanan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Unit Layanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	SIMBG	96.83	A	Sangat Baik
2.	IZIN USAHA OSS/NIB	98.19	A	Sangat Baik
3.	IZIN IZIN APLIKASI SICANTIK	93.22	A	Sangat Baik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai IKM pada masing-masing unit layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai dengan kategori A (Sangat Baik).

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.71 Selanjutnya Persyaratan pelayanan yang mendapatkan nilai 3.79 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga kesesuaian produk layanan 3.82 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3.9 dari Prilaku Petugas mendapatkan nilai tertinggi yang sama berikutnya yaitu 3.9

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Pelayanan sudah sesuai prosedur setiap bulan akan dibreafing untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan" .
- "Lebih ditingkatkan sarana dan prasarana, Jaringan wifinya ditingkatkan kestabilannya ". dengan bekerja sama dengan dinas kominfo
- "Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan 5 S senyum, sapa , salam sopan santun.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Karena masih terkait dengan dinas terkait dalam proses perizinanya
- Kemudahan Prosedur akan diupayakan akan menghubungi SKPD terkait untuk lebih mempermudah prosedur pelayanan perizinan

4.2 Rencana Tindak Lanjut

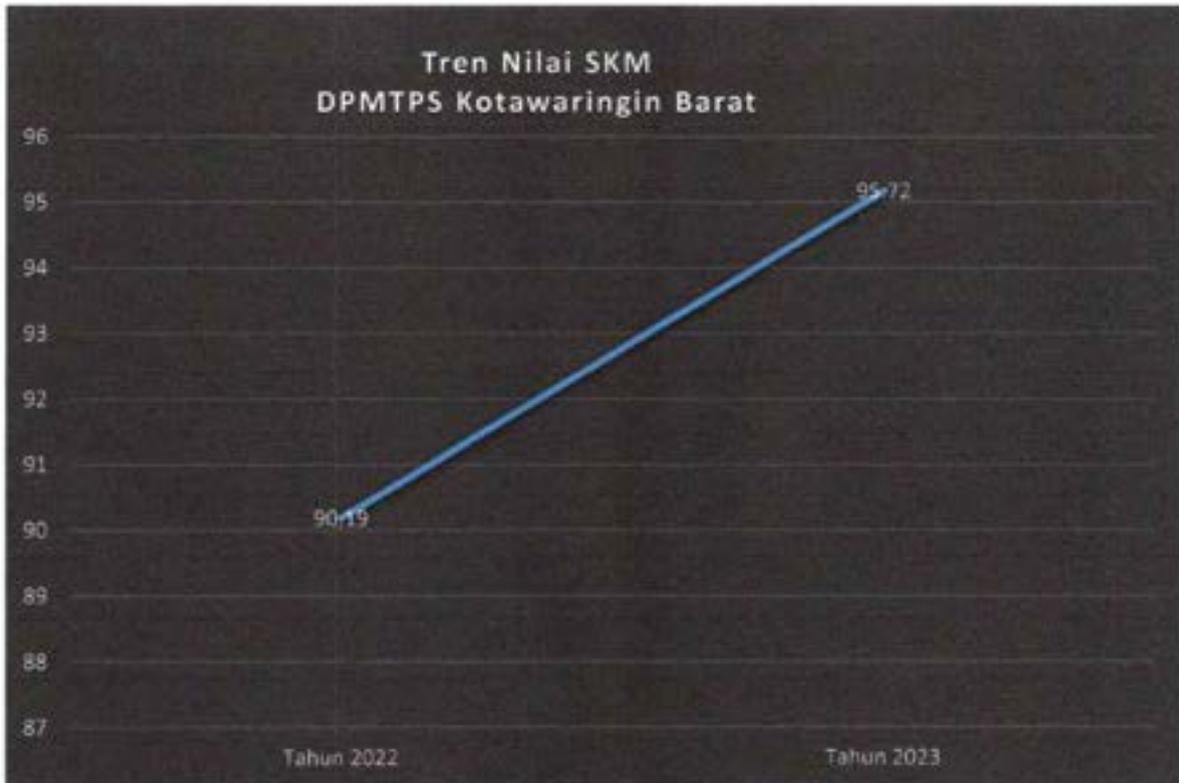
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan Perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, ,kurang dari 24 bulan), atau jangka Panjang (lebih dari 24 bulan), Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan penyelesaian izin	√	√	√		Bidang PTSP
2	Prosedur Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√	√	√	Bidang PTSP dan Dinas Terkait
3	Sarana dan Prasarana	Peningkatan dan Perbaikan Sistem dan Jaringan	√	√	√	√	DPMPTSP

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

yang ada dilapangan dalam kegiatan survei IKM dapat bermacam – macam Faktor timbulnya masalah, namun berdasarkan pengalaman dan avaluasi yang di peroleh, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya masalah tersebut adalah masyarakat (Responden) kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif) hal ini penyebabnya adalah kurangnya pemahaman responden (Masyarakat) akan pentingnya hasil survei IKM dan kurangnya kepercayaan responden (Masyarakat) terhadap perubahan paradigm.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai 2 Oktober 2023 hingga 15 Desember 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dipersepsikan Baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai IKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 95.72 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik.
2. Hasil survei menunjukkan IKM dengan kategori Kurang Baik adalah unsur kecepatan pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 92,75 dan nilai terendah kedua selanjutnya yaitu unsur Persyaratan yaitu 94.75 serta kesesuaian produk layanan mendapatkan nilai 95.5 tapi masih dalam mutu pelayanan A, sedangkan 7 unsur layanan lainnya dengan nilai tertinggi yaitu 1. Penanganan pengaduan 97.5, 2. Perilaku prtugas dengan nilai 97.5, 3. Kewajaran Biaya dengan nilai 96.75 , 4. kompetensi petugas nilai 96.25 , 5. kualitas sarpras 95,25 , 6. kemudahan prosedur dengan nilai 95,25. Meskipun unsur-unsur pelayanan tersebut baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi sedangkan unsur yang kurang baik maka perlu diperbaiki lagi.

3. Nilai IKM pada pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipersepsikan oleh masyarakat sangat Baik ada pada layanan Penanganan Pengaduan dengan nilai IKM sebesar 97.55 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhannya Triwulan IV tahun 2023 yaitu 95.72 dengan kategori mutu pelayanan sangat Baik.

Kotawaringin Barat, Desember 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat**



Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650105 199403 1 010

LAMPIRAN





Portal Survey

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Direksi Perhubungan

Provinsi	Jepang
Kabupaten	Kotawaringin Barat
Kecamatan	Sungai
Desa	...
RT	...

REKAM DATA SURVEI

Departemen Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tipe Jalan
Klasifikasi Jalan
* Jalan
Sangat Baik

Departemen Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tipe Jalan
Klasifikasi Jalan
* Jalan
Sangat Baik

CONTOH PERTANYAAN YANG ADA DI PORTAL SURVEY DPMPTSP :

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

- Tidak Cepat
- Kurang Cepat
- Cepat
- Sangat Cepat

Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.

- Sangat Mahal
- Cukup Mahal
- Murah
- Gratis

Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.

- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten

Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.

- Buruk

- Cukup
- Baik
- Sangat Baik

Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.

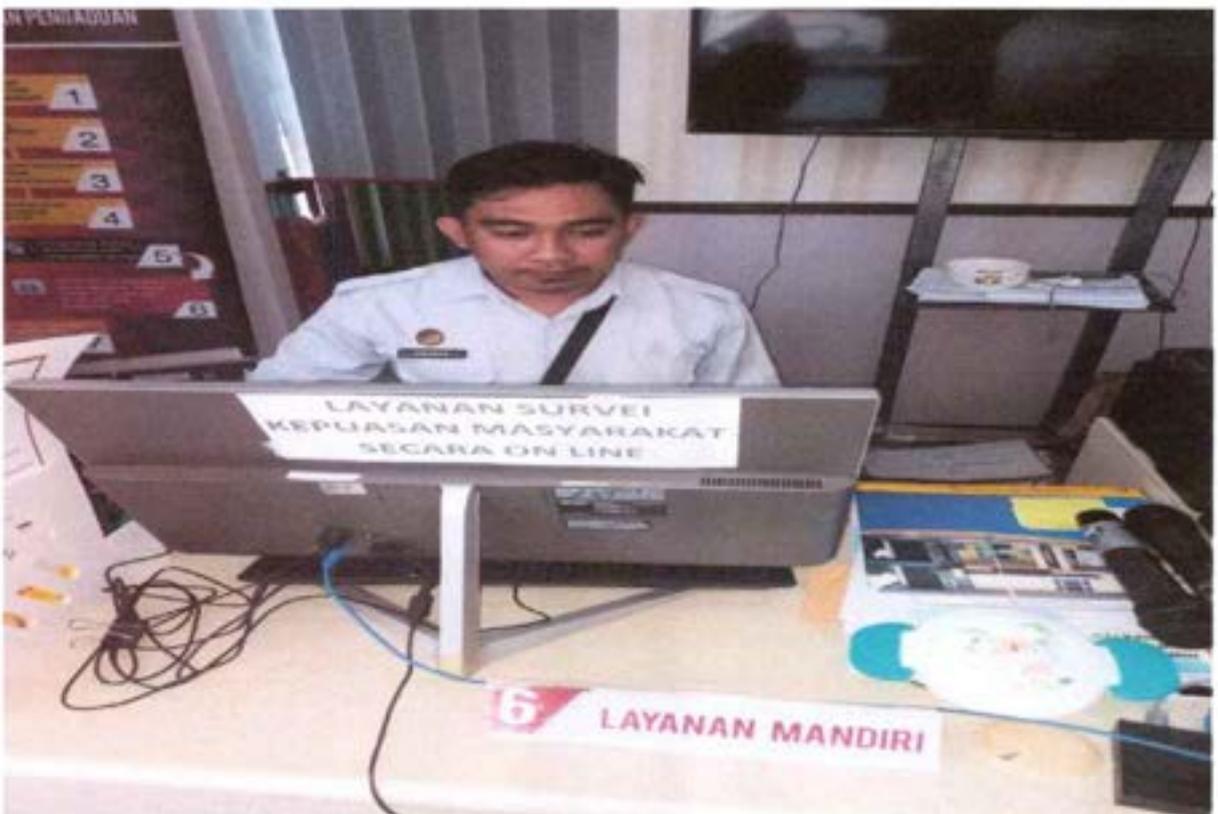
- Buruk
- Cukup
- Baik
- Sangat Baik

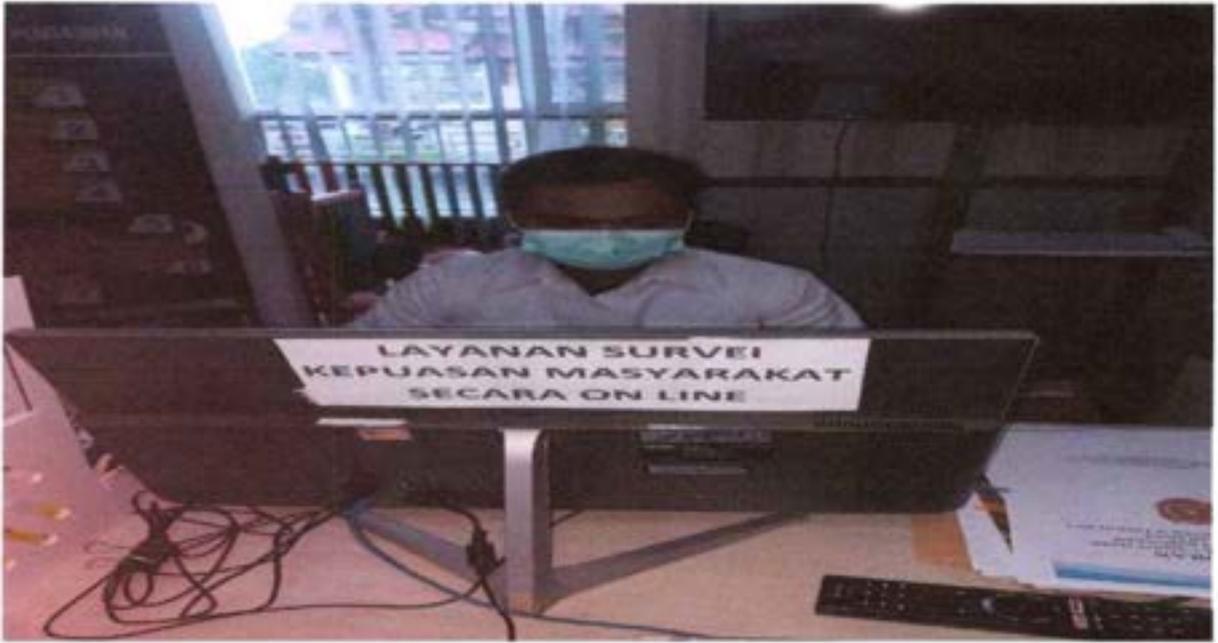
Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.

- Tidak ada
- Ada tetapi tidak berfungsi
- Berfungsi kurang maksimal
- Dikelola dengan baik

Photo masyarakat yang melaksanakan survey pada triwulan IV (EMPAT)











Hasil Olahan Data SKM

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	235	236	230	240	237	239	242	236	242	
NRR / Unsur	3,79	3,81	3,71	3,87	3,82	3,85	3,9	3,81	3,9	
NRR Tertimbang / unsur	0,4211	0,4233	0,4122	0,43	0,4244	0,4278	0,4333	0,4233	0,4333	95,28
IKM Unit Pelayanan						A (SANGAT BAIK)				

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN
U1	Persyaratan Pelayanan	3,79	94,75	A
U2	Kemudahan Prosedur	3,81	95,25	A
U3	Kecepatan Pelayanan	3,71	92,75	A
U4	Kewajaran Biaya	3,87	96,75	A
U5	Kesesuaian Produk Layanan	3,82	95,5	A
U6	Kompetensi Petugas	3,85	96,25	A
U7	Perilaku Petugas	3,9	97,5	A
U8	Kualitas Sarpras	3,81	95,25	A
U9	Penanganan Pengaduan	3,9	97,5	A
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			95,72	SANGAT BAIK

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NILAI IKM
95,72

TABEL REKAPITULASI RESPONDEN			
RESPONDEN			
Jumlah	:	62 orang	
JENIS KELAMIN	:	L = 26 orang P = 36 orang	
PENDIDIKAN		SD	= 0 orang
		SMP	= 4 orang
		SMA	= 20 orang
		DIII	= 9 orang
		S1	= 28 orang
		S2	= 1 orang
PEKERJAAN	:	ASN	= 14 orang
		TNI	= 1 orang
		POLRI	= 0 orang
		SWASTA	= 24 orang
		WIRASW ASTA	= 1 orang
		PELAJAR	= 0 orang
		LAINNYA	= 23 orang

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR PELAYANAN DAN PER UNSUR RESPONDEN TAHUN 2023

INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jml. Nilai Per Unsur Pelayanan	235	236	230	240	237	239	242	236	242
NRR Per Unsur Pelayanan	3.79	3.81	3.71	3.87	3.82	3.85	3.90	3.81	3.90
NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan	0.421	0.423	0.412	0.430	0.424	0.428	0.433	0.423	0.433
IKM UNIT PELAYANAN	95.72								

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Rata-rata	%	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	3.79	94.75	A
U2	Kemudahan Prosedur	3.81	95.25	A
U3	Kecepatan Pelayanan	3.71	92.75	A
U4	Kewajaran Biaya	3.87	96.75	A
U5	Kesesuaian Produk Layanan	3.82	95.5	A
U6	Kompetensi Petugas	3.85	96.25	A
U7	Perilaku Petugas	3.90	97.5	A
U8	Kualitas Sampas	3.81	95.25	A
U9	Pemangyanan Pengabdian	3.90	97.5	A
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			95.72	SANGAT BAIK

Prioritas Usama (D)	Jumlah
Prioritas Perbaikan	
	0

Prioritas Perbaikan		Jumlah
Perbaikan Proses (C)	0	
Prioritas Rendah (B)	0	
Berlebihan (A)	9	

No	Pekerjaan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Nilai Per Responden	NRR Per Responden	NRR Timbangan Per Responden	IKM Responden	Tingkat Kepuasan Responden	saran
1	ASN	SARJANA	P	36	SIP DOKTER	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34	3.78	0.0610	94.50	SANGAT PUAS	
2	TNI	SARJANA	L	29	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4.00	0.0645	100.00	SANGAT PUAS	pelelayanan sudah sesuai prosedur
3	Swasta	SARJANA	L	23	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28	3.11	0.0302	77.75	PUAS	Semoga bisa lebih efisien
4	Lainnya	SARJANA	P	30	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4.00	0.0645	100.00	SANGAT PUAS	pelelayanan dipertambakan
5	Lainnya	SMA	L	38	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4.00	0.0645	100.00	SANGAT PUAS	
6	Lainnya	SMA	L	43	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4.00	0.0645	100.00	SANGAT PUAS	
7	Lainnya	SMA	P	45	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4.00	0.0645	100.00	SANGAT PUAS	pelelayanan cepat izin nili kami langsung jadi
8	Swasta	PASCASARJANA	P	50	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4.00	0.0645	100.00	SANGAT PUAS	terimakasih
9	Swasta	SARJANA	L	30	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	3	3	4	4	4	4	3	4	32	3.56	0.0374	89.00	PUAS	

No	Pekerjaan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Nilai Per Responden	NRR Per Responden	NRR Timbangan Per Responden	IKM Responden	Tingkat Kepuasan Responden	saran
10	ASN	SARJANA	P	36	SIP DOKTER	4	4	3	4	3	3	4	3	4	32	3,56	0,0574	89,00	PUAS	
11	Lainnya	DIPLOMA	P	32	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	4	4	3	3	3	3	3	4	30	3,33	0,0537	83,25	PUAS	baik
12	Swasta	SMA	L	45	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
13	Swasta	SARJANA	P	28	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	3,89	0,0627	97,25	SANGAT PUAS	semoga semakin lebih baik kedepannya
14	Lainnya	SMA	L	23	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	3	3	3	3	3	4	3	1	26	2,89	0,0466	72,25	KURANG PUAS	
15	ASN	SMA	L	26	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
16	ASN	SARJANA	P	35	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34	3,78	0,0610	94,50	SANGAT PUAS	tingkatkan pelayanan demi kenyamanan
17	ASN	DIPLOMA	P	34	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35	3,89	0,0627	97,25	SANGAT PUAS	
18	ASN	SARJANA	P	30	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	3	3	4	3	3	4	3	4	31	3,44	0,0555	86,00	PUAS	-
19	Swasta	SARJANA	L	35	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
20	Swasta	SARJANA	L	27	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	

No	Pekerjaan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Nilai Per Responden	NRR Per Responden	NRR Timbangan Per Responden	IKM Responden	Tingkat Kepuasan Responden	saran
21	Swasta	DIPLOMA	P	26	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	terimakasih atas pelayanan yang maksimal dan memuaskan
22	Swasta	SARJANA	L	32	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	3	3	4	3	4	4	4	1	29	3,22	0,0519	80,50	PUAS	
23	Lainnya	DIPLOMA	P	31	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	3,89	0,0627	97,25	SANGAT PUAS	terimakasih atas bantuannya kepada petugas pelayanan semua sudah jelas di jelaskan dan ramah pelayannya, pertahankan dan semoga bisa lebih baik lagi
24	Swasta	SARJANA	L	31	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	system nya sangat bagus dan mudah mengoperasikannya
25	ASN	SARJANA	P	36	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	3	3	4	3	3	4	3	4	30	3,33	0,0537	83,25	PUAS	
26	ASN	SARJANA	P	36	SIP DOKTER	4	3	3	4	3	4	3	3	4	31	3,44	0,0555	86,00	PUAS	
27	Swasta	SARJANA	P	24	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35	3,89	0,0627	97,25	SANGAT PUAS	
28	ASN	SARJANA	P	38	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
29	Lainnya	SMA	L	26	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	

No	Pekerjaan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Nilai Per Responden	NRR Per Responden	NRR Tambahan Per Responden	IKM Responden	Tingkat Kepuasan Responden	saran
30	Swasta	SMA	P	35	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	terima kasih banyak telah membantu
31	Lainnya	SARJANA	P	45	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
32	ASN	SARJANA	P	38	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
33	Swasta	SMA	L	26	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	terima kasih
34	ASN	SARJANA	P	41	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29	3,22	0,0519	80,50	PUAS	
35	ASN	SARJANA	P	41	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29	3,22	0,0519	80,50	PUAS	
36	Lainnya	DIPLOMA	L	25	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	3	3	4	4	4	4	3	4	32	3,56	0,0574	89,00	PUAS	
37	Lainnya	SARJANA	P	26	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35	3,89	0,0627	97,25	SANGAT PUAS	
38	Lainnya	SARJANA	P	28	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	3	3	3	4	4	3	3	4	31	3,44	0,0555	86,00	PUAS	
39	Swasta	SMA	P	55	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
40	ASN	SARJANA	L	35	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	

No	Pekerjaan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Nilai Per Responden	NRR Per Responden	NRR Timbangan Per Responden	IKM Responden	Tingkat Kepuasan Responden	saran
41	Lainnya	SARJANA	P	28	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
42	Swasta	SMA	L	45	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
43	Lainnya	SMA	P	45	SIMBG	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
44	Swasta	SMA	L	33	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
45	Swasta	SARJANA	P	35	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
46	Lainnya	SARJANA	L	45	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
47	Lainnya	SMA	P	38	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
48	Swasta	SMA	L	38	SIMBG	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	3,89	0,0627	97,25	SANGAT PUAS	
49	Swasta	SARJANA	L	45	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
50	Swasta	SMK	L	26	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
51	Swasta	SMA	P	35	SIMBG	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
52	Swasta	SMA	P	27	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	

No	Pekerjaan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Nilai Per Responden	NRR Per Responden	NRR Tambangan Per Responden	IKM Responden	Tingkat Kepuasan Responden	saran
53	Swasta	DIPLOMA	L	35	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
54	Lainnya	DIPLOMA	P	26	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
55	Lainnya	DIPLOMA	P	38	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
56	Lainnya	SNMP	P	38	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
57	Lainnya	SNMP	P	45	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
58	Lainnya	SNMP	P	35	IZIN USAHA /OSS/NIB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
59	Swasta	SMA	L	50	SIMBG	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
60	Lainnya	SMA	L	50	SIMBG	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	3,89	0,0627	97,25	SANGAT PUAS	
61	ASN	DIPLOMA	P	35	IZIN-IZIN APLIKASI SICANTIK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0645	100,00	SANGAT PUAS	
62	Lainnya	SMA	L	45	SIMBG	3	3	2	2	4	4	4	4	4	30	3,33	0,0537	83,25	PUAS	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Telpn (0532) 28064 / Fax (0532) 23057
Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112
Website : dpmpmsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmpspkobar@gmail.com

SEKTOR PENANAMAN MODAL

Keterangan	Satuan	TAHUN 2023				TOTAL	KET
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)							
- PMDN	Perusahaan	53	51	66	72		Jumlah Perusahaan yang aktif (dalam pelaporan lkpm) di Kobar
- PMA	Perusahaan	13	14	14	13		
Jumlah Proyek							
- PMDN	Proyek	96	106	168	190		
- PMA	Proyek	27	32	26	25		
Jumlah Investasi Berskala Nasional							
- PMDN	Rp	505.016.100.000	193.657.000.000	115.365.300.000	216.054.000.000	1.030.092.400.000,00	
- PMA	Rp	1.317.760.000.000	694.682.400.000	655.391.360.000	32.516.035.540	2.700.349.795.540,00	
TOTAL REALISASI INVESTASI		1.822.776.100.000	888.339.400.000	770.756.660.000	248.570.035.540	3.730.442.195.540,00	
Rasio daya serap tenaga Kerja							
- TKI	Orang	1.175	1.929	368	1.205	4.677	
- TKA	Orang	4	3	6	2	15	

Sumber : sebaran realisasi investasi provinsi Kalteng

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650105 199403 1 010

**TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEADU SATU PINTU**

**TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
					(%)				(%)			(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	20=5+9+13+17	=(20/3)*100	22
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,746,733,367	5,453,352,690	5,239,202,817	96.07	100.00	293,380,677	289,823,656	98.79	100.00	5,529,026,473	96.21	100.00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93,775,608	93,775,608	87,564,132	93.38	100.00	-	-	-	-	87,564,132.00	93.38	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,322,608	44,322,608	39,316,820	88.71	100.00					39,316,820	88.71	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,497,250	2,497,250	1,297,250	51.95	100.00					1,297,250	51.95	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,505,500	2,505,500	2,505,500	100.00	100.00					2,505,500	100.00	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2,497,250	2,497,250	2,497,250	100.00	100.00					2,497,250	100.00	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,752,500	1,752,500	1,752,500	100.00	100.00					1,752,500	100.00	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	37,698,900	37,698,900	37,693,212	99.98	100.00					37,693,212	99.98	100.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,501,600	2,501,600	2,501,600	100.00	100.00					2,501,600	100.00	100.00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,622,566,429	4,622,566,429	4,452,917,198	96.33	100.00					4,452,917,198	96.33	100.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
					(%)				(%)			(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	20=5+9+13+17	=(20/3)*100	22
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,571,628,195	4,571,628,195	4,402,152,323	96.29	99.82					4,402,152,323	96.29	99.82
	Belanja Gaji Pokok PNS	1,706,798,000	1,706,798,000	1,665,143,438	97.56	100.00					1,665,143,438	97.56	100.00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	143,633,000	143,633,000	140,994,154	98.16	100.00					140,994,154	98.16	100.00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	97,856,000	97,856,000	97,450,000	99.59	100.00					97,450,000	99.59	100.00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	98,980,000	98,980,000	92,060,000	93.01	100.00					92,060,000	93.01	100.00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34,310,000	34,310,000	33,600,000	97.93	100.00					33,600,000	97.93	100.00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	93,991,000	93,991,000	91,756,140	97.62	100.00					91,756,140	97.62	100.00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,606,000	7,606,000	7,488,334	98.45	100.00					7,488,334	98.45	100.00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,195	25,195	22,662	89.95	100.00					22,662	89.95	100.00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	151,681,000	151,681,000	139,238,659	91.80	100.00					139,238,659	91.80	100.00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,516,000	3,516,000	3,421,510	97.31	100.00					3,421,510	97.31	100.00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10,548,000	10,548,000	10,264,536	97.31	100.00					10,264,536	97.31	100.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	858,444,000	858,444,000	819,558,274	95.47	100.00					819,558,274	95.47	100.00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,356,080,000	1,356,080,000	1,297,074,616	95.65	100.00					1,297,074,616	95.65	100.00
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	8,160,000	4,080,000	50.00	100.00					4,080,000	50.00	100.00
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,865,000	8,865,000	8,865,000	100.00	100.00					8,865,000	100.00	100.00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40,574,984	40,574,984	40,401,625	99.57	100.00					40,401,625	99.57	100.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
					(%)				(%)			(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	20=5+9+13+17	=(20/3)*100	22
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,498,250	1,498,250	1,498,250	100.00	100.00					1,498,250	100.00	100.00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67,836,000	67,836,000	54,517,560	80.37	100.00	-	-	-	-	54,517,560	80.37	100.00
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19,800,000	19,800,000	19,800,000	100.00	100.00					19,800,000	100.00	100.00
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,036,000	48,036,000	34,717,560	72.27	100.00					34,717,560	72.27	100.00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322,005,019	322,005,019	308,119,330	95.69	100.00					308,119,330	95.69	100.00
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,929,596	7,929,596	7,929,472	100.00	100.00					7,929,472	100.00	100.00
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,188,421	58,188,421	58,187,901	100.00	100.00					58,187,901	100.00	100.00
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,167,406	7,167,406	7,167,333	100.00	100.00					7,167,333	100.00	100.00
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,050,000	25,050,000	25,050,000	100.00	100.00					25,050,000	100.00	100.00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223,669,596	223,669,596	209,784,624	93.79	100.00					209,784,624	93.79	100.00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,505,677	-	-			94,505,677	93,931,250	99.39	100.00	93,931,250	99.39	100.00
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94,505,677					94,505,677	93,931,250	99.39	100.00			

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
					(%)				(%)			(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100	22
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268,686,883	268,686,883	259,711,847	96.66	100.00	-	-	-	-	259,711,847	96.66	100.00
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350,000	350,000	-		100.00					-	-	100.00
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92,578,883	92,578,883	88,993,890	96.13	100.00					88,993,890	96.13	100.00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175,758,000	175,758,000	170,717,957	97.13	100.00					170,717,957	97.13	100.00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277,357,751	78,482,751	76,372,750	97.31	100.00	198,875,000	195,892,406	98.50	100.00	272,265,156	98.16	100.00
23	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	44,072,751	44,072,751	41,962,750	95.21	100.00					41,962,750	95.21	100.00
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,410,000	34,410,000	34,410,000	100.00	100.00					34,410,000	100.00	100.00
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198,875,000					198,875,000	195,892,406	98.50	100.00	195,892,406	98.50	100.00
											-	-	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	156,834,012	156,834,012	127,231,052	81.12	100.00					127,231,052	81.12	100.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
					(%)				(%)			(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100	22
VIII	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	129,334,012	129,334,012	99,736,052	77.12	100.00					99,736,052	77.12	100.00
26	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	129,334,012	129,334,012	99,736,052	77.12	100.00					99,736,052	77.12	100.00
IX	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	27,500,000	27,500,000	27,495,000	99.98	100.00					27,495,000	99.98	100.00
27	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	27,500,000	27,500,000	27,495,000	99.98	100.00					27,495,000	99.98	100.00
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	229,931,321	229,931,321	213,928,390	93.04	100.00					213,928,390	93.04	100.00
X	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	229,931,321	229,931,321	213,928,390	93.04	100.00					213,928,390	93.04	100.00
28	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	229,931,321	229,931,321	213,928,390	93.04	100.00					213,928,390	93.04	100.00
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	130,481,300	130,481,300	126,311,862	96.80	100.00	-	-	-	-	126,311,862	96.80	100.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
					(%)				(%)			(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100	22
XI	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	130,481,300	130,481,300	126,311,862	96.80	100.00					126,311,862	96.80	100.00
29	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	52,620,800	52,620,800	51,693,112	98.24	100.00					51,693,112	98.24	100.00
30	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	69,471,000	69,471,000	66,229,700	95.33	100.00					66,229,700	95.33	100.00
31	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8,389,500	8,389,500	8,389,050	99.99	100.00					8,389,050	99.99	100.00
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	450,500,000	450,500,000	371,774,707	82.52	100.00					371,774,707	82.52	100.00
XII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	450,500,000	450,500,000	371,774,707	82.52	100.00					371,774,707	82.52	100.00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-								-		
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	372,955,000	372,955,000	299,713,707	80.36	100.00					299,713,707	80.36	100.00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	PAGU APBD (.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
			PAGU BELANJA OPERASI (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
					(%)				(%)			(%)	
1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100	22
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	77,545,000	77,545,000	72,061,000	92.93	100.00					72,061,000	92.93	100.00
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	44,540,000	44,540,000	44,426,312	99.74	100.00	-	-	-	-	44,426,312	99.74	100.00
XIII	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,540,000	44,540,000	44,426,312	99.74	100.00					44,426,312	99.74	100.00
35	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44,540,000	44,540,000	44,426,312	99.74	100.00					44,426,312	99.74	100.00
TOTAL		6,759,020,000	6,465,639,323	6,122,875,140	94.70	100.00	293,380,677	289,823,656	98.79	100.00	6,412,698,796	94.88	100.00

Pangkalan Bun, 03 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SUB BIDANG/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN/KET LAINNYA	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan Permasalahan
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK (Rp)	SWAKELOLA (Rp)		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik	%	
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal										-			-	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	230	Pelaku Usaha	230	371,155,000		371,155,000	230	Pelaku Usaha		299,713,707	80.75	371,155,000.00	100.00	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	75	Kegiatan Usaha	75	77,545,000		77,545,000	75	Kegiatan Usaha		72,061,000	92.93	77,545,000.00	100.00	
TOTAL					448,700,000		448,700,000				371,774,707	82.86	448,700,000.00	100.00	

Pangkalan Bun, 03 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN / PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
22	Pengawasan Teknis Pemeliharaan gedung kantor	1	7,549,893	1	7,549,893	1	7,549,893	1	7,549,893	1	7,468,524	-	-
23	Perencanaan Teknis Pemeliharaan gedung kantor	1	5,607,211	1	5,607,211	1	5,607,211	1	5,607,211	1	5,526,690	-	-
24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer	1	12,410,000	1	12,410,000	1	12,410,000	1	12,410,000	1	12,410,000	-	-
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	8,749,500	1	8,749,500	1	8,749,500	1	8,749,500	1	8,452,500	-	-
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1	7,813,512	1	7,813,512	1	7,813,512	1	7,813,512	1	7,260,432	-	-
27	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan dan Pembahasan Kebijakan dan Regulasi	1	32,505,000	1	32,505,000	1	32,505,000	1	32,505,000	1	24,045,000	-	-
28	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1	18,750,009	1	18,750,009	1	18,750,009	1	18,750,009	1	18,750,009	-	-
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	8,999,600	1	8,999,600	1	8,999,600	1	8,999,600	1	7,439,600	-	-
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	700,000	1	700,000	1	700,000	1	700,000	1	700,000	-	-
31	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Pelaku Usaha	1	5,775,000	1	5,775,000	1	5,775,000	1	5,775,000	1	750,000	-	-
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	15,379,919	1	15,379,919	1	15,379,919	1	15,379,919	1	13,579,650	-	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN / PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
56	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1	84,878,489	1	84,878,489	1	84,878,489	1	84,878,489	1	81,753,400	-	-
Total Pagu 50 s/d 200 Juta		4	422,611,317	4	422,611,317	3	422,611,317	3	422,611,317	4	416,109,856	-	-

Keterangan :

- : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
 - Penggandaan dan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
 - Penjilidan-Koordinasi dan : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
 - Penyusunan Laporan : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan
- Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)

Pangkalan Bun, 03 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

HAMBATAN/KENDALA REALISASI KEUANGAN DI BAWAH 98%

Pada DAK Non Fisik ada perbedaan SBU Pusat
(Kementerian investasi/ BKPM dan SBU Daerah (Pemda
Kabupaten Kotawaringin Barat)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112

Telpon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454 email : dpmpstsp@kalteng.go.id

Website : <https://dpmpstsp.kalteng.go.id>

Palangka Raya, 20 Maret 2023

Kepada

Nomor : 570 / 136 /B.IV/DPMPSTSP-2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota
di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023

Yth. Kepala DPMPSTSP Kabupaten / Kota
(data terlampir)
di -
tempat

Sebagai tindak lanjut Rapat perkembangan Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal di Direktorat Wilayah II dengan peserta dari DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Jambi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di Bandung, Jawa Barat, bahwa target realisasi investasi dari Kementerian Investasi/BKPM RI yang diturunkan untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 16,09 Triliun.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, target realisasi investasi tahun 2023 disalurkan ke 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian kontribusi sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Target Realisasi Investasi Tahun 2023 (Rp. Juta)	Persentase Kontribusi (%)
1.	Kabupaten Barito Selatan	523.100,08	3,25 %
2.	Kabupaten Barito Timur	445.659,24	2,77 %
3.	Kabupaten Barito Utara	376.159,27	2,34 %
4.	Kabupaten Gunung Mas	298.399,92	1,85 %
5.	Kabupaten Kapuas	1.017.266,60	6,32 %
6.	Kabupaten Katingan	262.129,94	1,63 %
7.	Kabupaten Kotawaringin Barat	3.091.410,42	19,21 %
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	5.525.715,16	34,34 %
9.	Kabupaten Lamandau	458.449,16	2,85 %
10.	Kabupaten Murung Raya	2.153.996,90	13,39 %
11.	Kabupaten Pulang Pisau	911.305,93	5,66 %
12.	Kabupaten Seruyan	582.741,96	3,62 %
13.	Kabupaten Sukamara	59.120,76	0,37 %
14.	Kota Palangkaraya	384.544,67	2,39 %
TOTAL		16.090.000,00	100.00%

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan acuan sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTOYO, S.STP., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 197910112000121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah sebagai laporan.
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI di Jakarta.
3. Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM Kementerian Investasi/BKPM RI di Jakarta.
4. Arsip.